

ANALISIS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022



PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN

ANALISIS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022

**Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Kementerian Pertanian
2022**

ANALISIS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022

Volume 1 Tahun 2022

Ukuran Buku : 10,12 inci x 7,17 inci (B5)

Jumlah Halaman : 85 halaman

Penasehat :

Roby Darmawan, M. Eng

Penyunting :

Mas'ud, SE, M.Si

Sri Wahyuningsih, S.Si

Naskah :

Sehusman,SP

Ir. Sabarella, M.Si

Ir. Wieta B Komalasari, M.Si

Megawati Manurung, SP

Yani Supriyati, SE

Rinawati, SE

Karlina Seran, S.Si

Maidiah Dwi Naruri Saida, S.Si

Revi Firmansyah, S.Si

Vira Desita Amara

Design Sampul :

Rinawati, SE

Diterbitkan oleh :

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Kementerian Pertanian

2022

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga publikasi "Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2022" telah diselesaikan. Publikasi ini merupakan salah satu output dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dalam mengemban visi dan misinya dalam mempublikasikan data sektor pertanian maupun hasil analisisnya.

Publikasi Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2022 disusun berdasarkan data dan informasi data sekunder yang bersumber dari instansi terkait baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog serta dari *website* GFSI (*Global Food Security Index*) dan *Food and Agriculture Organization (FAO)*.

Penyajian analisis meliputi keragaan penyusun aspek ketahanan pangan diantaranya pola panen dan produksi padi serta provinsi sentra produksi komoditas pangan, stok pangan, konsumsi, pengeluaran untuk konsumsi, kemiskinan, ketidakcukupan pangan dan indikator lainnya selama 3 sampai 5 tahun terakhir serta dilengkapi dengan analisis *import dependency ratio* (IDR) dan *self sufficiency ratio* (SSR) komoditas pangan, analisis neraca penyediaan dan kebutuhan pangan, serta analisis ketahanan pangan lainnya.

Publikasi ini disajikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dapat diakses melalui *website* Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yaitu <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/publikasi/buletin>. Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan para pembaca dapat memperoleh gambaran perkembangan ketahanan pangan secara lengkap.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan publikasi berikutnya.

Jakarta, November 2022
Kepala Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian,



Roby Darmawan, M.Eng

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
BAB II. METODOLOGI	3
2.1. Sumber Data dan Informasi	3
2.2. Metode Analisis	3
BAB III. GAMBARAN UMUM ASPEK KETAHANAN PANGAN	5
3.1. Aspek Ketersediaan Pangan.....	5
3.2. Aspek Keterjangkauan Pangan.....	17
3.3. Aspek Kualitas dan Keamanan Pangan.....	41
BAB IV. ANALISIS KETAHANAN PANGAN.....	49
4.1. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Pangan.....	49
4.2. Indeks Ketahanan Pangan	59
4.3. <i>Global Food Security Index</i> (GFSI)	66
BAB V. KESIMPULAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 3.1.1.a. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Pangan Utama, 2021	9
Tabel 3.1.1.b. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Sayuran dan Tebu, 2021	9
Tabel 3.1.1.c. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Peternakan dan Kelapa Sawit, 2021	10
Tabel 3.1.2. <i>Import Dependency Ratio</i> (IDR) dan <i>Self Sufficiency Ratio</i> (SSR) Beras, 2019 – 2021	15
Tabel 3.1.3. <i>Import Dependency Ratio</i> (IDR) dan <i>Self Sufficiency Ratio</i> (SSR) Pangan Lainnya, 2019 – 2021	16
Tabel 3.2.1. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2017 – 2021	19
Tabel 3.2.2. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan, 2017 – 2021	21
Tabel 3.2.3. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perdesaan, 2017 – 2021	22
Tabel 3.2.4. Tingkat Partisipasi Beberapa Bahan Makanan, 2017 – 2021 .	25
Tabel 3.2.5. Pengeluaran untuk Makanan menurut Provinsi, 2017 – 2021.	29
Tabel 3.2.6. Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi, 2018 – 2022	32
Tabel 3.2.7. Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi, 2018 – 2022.	34
Tabel 3.2.8. Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan menurut Provinsi, 2018 – 2022	35
Tabel 3.2.9. Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan menurut Provinsi, 2018 – 2022	36
Tabel 3.2.10. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Provinsi, 2021 – 2022	39

Tabel 3.2.11. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut .Provinsi, 2021 – 2022	40
Tabel 3.3.1. Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Indonesia, 2019 – 2021	41
Tabel 3.3.2. Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan Indonesia Menurut Kelompok Pangan, 2019 – 2021	43
Tabel 3.3.3. Prevelansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan per Provinsi, 2019 – 2021	46
Tabel 3.3.4. Perkembangan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (FIES) Menurut Provinsi, 2019 – 2021	48
Tabel 4.1.1. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Beras, Januari – Desember 2022	50
Tabel 4.1.2. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Jagung dan Kedelai, Januari – Desember 2022	52
Tabel 4.1.3. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Bawang Merah dan Bawang Putih, Januari – Juli 2022	53
Tabel 4.1.4. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Cabe Besar dan Cabe Rawit, Januari – Juli 2022	55
Tabel 4.1.5. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Gula dan Minyak Goreng, Januari – Desember 2022	57
Tabel 4.1.6. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Daging Sapi/Kerbau, Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras, Januari – Desember 2022 ...	58
Tabel 4.2.1. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, 2019 - 2021	60
Tabel 4.2.2. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten, 2019 - 2021	64
Tabel 4.2.3. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota, 2019 - 2021	65

Tabel 4.3.1.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan <i>Global Food Security Index</i> , 2018 - 2022	68
Tabel 4.3.2.	Indeks Ketahanan Pangan Negara di Dunia, 2018 - 2022.....	70
Tabel 4.3.3.	<i>Global Food Security Index</i> Negara di Dunia, 2022	71
Tabel 4.3.4.	Indeks Ketahanan Pangan Negara di Asia Pasifik, 2018 - 2022	74
Tabel 4.3.5.	<i>Global Food Security Index</i> Negara di Asia Pasifik, 2022	76

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 3.1.1. Pola Panen Padi di Indonesia, 2019 – 2021	6
Gambar 3.1.2. Provinsi Sentra Produksi Padi di Indonesia, 2019 – 2021 ..	7
Gambar 3.1.3. Pengelompokan Provinsi berdasarkan Produksi Padi	8
Gambar 3.1.4. Sebaran Stok Beras Menurut Periode dan Institusi, SCBN 2022	12
Gambar 3.1.5. Rata – Rata Sebaran Stok Beras, SCBN 2022	12
Gambar 3.1.6. Sebaran Stok Beras di Bulog, Januari 2020–Oktober 2022...	14
Gambar 3.2.1. Pola Pengeluaran per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2021	18
Gambar 3.2.2. Pola Pengeluaran Bahan Makanan per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan + Perdesaan, 2021	20
Gambar 3.2.3. Perkembangan Pola Pengeluaran menurut Kelompok Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2021	23
Gambar 3.2.4. Pola Pengeluaran Bahan Makanan per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2020	24
Gambar 3.2.5. Boxplot Persentase Pengeluaran untuk Makanan menurut Provinsi, 2017 - 2021	26
Gambar 3.2.6. Boxplot Pengeluaran untuk Makanan Provinsi, 2017 - 2021	28
Gambar 3.2.7. Boxplot Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan, Perdesaan dan Total menurut Provinsi, 2018 - 2022	37
Gambar 3.3.1. Rata – Rata Konsumsi Energi dan Protein per Provinsi, 2021	42
Gambar 3.3.2. Perkembangan Kerawanan Pangan (PoU) Sedang dan Berat (FIES) di Indonesia, 2019 - 2021	45
Gambar 4.1.1. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Beras, Januari – Desember 2022	51
Gambar 4.1.2. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Cabe Besar dan Cabe Rawit, Januari-Juli 2022	54

Gambar 4.1.3.	Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Gula, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras, 2022	56
Gambar 4.2.1.	Boxplot Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, 2019 - 2021	61
Gambar 4.2.2.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, 2019 - 2021	62
Gambar 4.2.3.	Sepuluh Peringkat Pertama dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten, 2019 - 2021	63
Gambar 4.2.4.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota, 2019 - 2021	65
Gambar 4.3.1.	Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan <i>Global Food Security Index</i> , 2018 - 2022	68
Gambar 4.3.2.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Negara di Dunia, 2021 - 2022	70
Gambar 4.3.3.	Pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan Global Negara di Asia Pasifik, 2018 - 2022	75

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Ketahanan Pangan No.18 tahun 2012, bahwa ketahanan pangan adalah "kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Ketahanan pangan nasional masih menjadi isu yang penting bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya meliputi **ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta kualitas dan keamanan pangan**. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga sub sistem tersebut.

Produksi dan ketersediaan pangan merupakan kemampuan masyarakat dan negara dalam menyediakan pangan dari produksi domestik maupun dari luar negeri (impor). Ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional atau wilayah adalah unsur penting dalam membangun ketahanan pangan. Namun demikian ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional dan provinsi tidak secara otomatis menjamin ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan individu. Pangan dapat tersedia dan diakses secara fisik namun bila sebagian anggota rumah tangga tidak mendapat manfaat secara maksimal karena masalah distribusi pangan, baik jumlah maupun keragaman yang

disebabkan kondisi tubuh tidak dapat menyerap pangan karena sakit maupun penyiapan pangan yang kurang tepat. Untuk mendapatkan gambaran yang komperhensif terkait ketahanan pangan tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai instansi penyedia data dan informasi di lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2022 telah melakukan analisis ketahanan pangan yang bersumber dari data sekunder berbagai sumber dengan menggunakan berbagai indikator aspek penyusun ketahanan pangan.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya analisis ketahanan pangan adalah untuk melakukan kajian terhadap:

- a. Perkembangan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan masyarakat Indonesia, 2019 – 2021/2022
- b. Analisis ketahanan pangan dari berbagai indikator baik secara nasional maupun posisi Indonesia dibandingkan negara lainnya.

BAB II. METODOLOGI

2.1. Sumber Data dan Informasi

Analisis ketahanan pangan ini disusun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari instansi terkait baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog serta dari *website* GFSI (*Global Food Security Index*) dan *Food and Agriculture Organization (FAO)*.

2.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan analisis ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

A. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis keragaan diantaranya dengan menampilkan nilai rata-rata pertumbuhan per tahun, rata-rata dan persen kontribusi (*share*) yang mencakup indikator penyusun ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas dan keamanan pangan. Indikator yang dimaksud meliputi data produksi, ekspor, impor, stok, harga, konsumsi, pengeluaran, kemiskinan dan lainnya. Penyajian analisis berupa tabel maupun visualisasi grafik/gambar berupa grafik batang, *boxplot*, *pie chart*, histogram dan lainnya.

B. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam analisis ketahanan pangan antara lain :

✓ **Import Dependency Ratio (IDR)**

Import Dependency Ratio (IDR) merupakan formula yang menyediakan informasi ketergantungan suatu negara terhadap impor suatu komoditas. Nilai IDR dihitung berdasarkan definisi yang dibangun oleh FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*).

Perhitungan nilai IDR tidak termasuk perubahan stok dikarenakan besarnya stok (baik dari impor maupun produksi domestik) tidak diketahui.

$$\text{IDR} = \frac{\text{Impor}}{(\text{Produksi} + \text{impor} - \text{ekspor})} \times 100$$

✓ **Self Sufficiency Ratio (SSR)**

Nilai SSR menunjukkan besarnya produksi dalam kaitannya dengan kebutuhan dalam negeri. SSR diformulasikan sbb.:

$$\text{SSR} = \frac{\text{Produksi}}{(\text{Produksi} + \text{impor} - \text{ekspor})} \times 100$$

✓ **Neraca Pangan**

Ketersediaan = Stok awal + Produksi

Kebutuhan = (konsumsi per kapita (Susenas) X Jumlah Penduduk) +
Konsumsi di luar rumah tangga + konsumsi lainnya

Neraca Pangan (surplus/defisit) = Ketersediaan - Kebutuhan

BAB III. GAMBARAN UMUM ASPEK KETAHANAN PANGAN

3.1. Aspek Ketersediaan Pangan

Aspek ketersediaan mencakup produksi, stok serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga meskipun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya sesuai permintaan dari waktu ke waktu.

3.1.1. Pola Panen dan Produksi

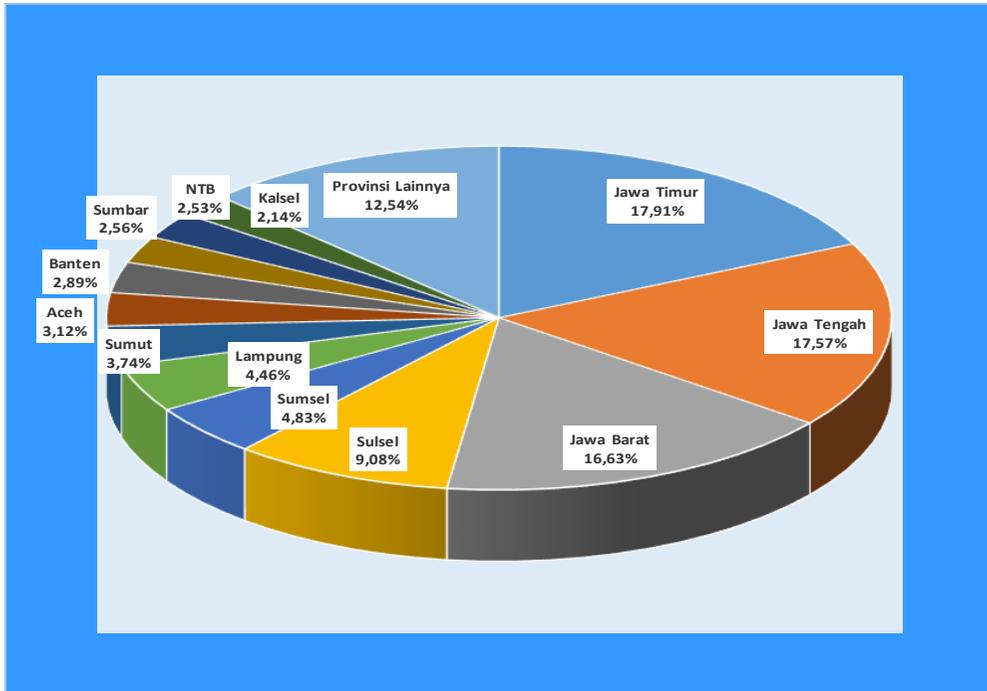
Pemenuhan konsumsi pangan terutama beras, sebagai bahan makanan utama sekaligus sumber nutrisi penting dalam struktur pangan melalui aspek penyediaan menjadi hal yang sangat penting, mengingat jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Padi dibudidayakan hampir di semua provinsi di Indonesia sepanjang tahun tanpa mengenal musim khususnya untuk lahan sawah dengan irigasi yang bagus. Hal ini ditunjukkan dengan pola panen bulanan padi di Indonesia terjadi sepanjang tahun seperti yang tersaji pada Gambar 3.1.1. Berdasarkan data hasil Kerangka Survei Area (KSA) padi oleh BPS tahun 2019 sampai 2021, luas panen padi di Indonesia cenderung menurun sebesar 1,25% per tahun atau menjadi 10,41 juta hektar tahun 2021. Secara umum, puncak panen padi di Indonesia terjadi pada bulan Maret pada tahun 2019 dan 2021, namun tahun 2020 bergeser puncak panen terjadi pada April. Puncak panen di bulan Maret 2021 lebih tinggi 3,89% dibandingkan 2019 yaitu sebesar 1,79 juta ha. Sementara puncak panen April 2020 lebih tinggi 3,95% dibandingkan Maret 2021 atau sebesar 1,86 juta ha. Selain pada bulan tersebut, puncak panen kedua terjadi pada Agustus 2019 dan

2020 serta Juli 2021, dan selanjutnya luas panen makin berkurang sampai awal tahun berikutnya.



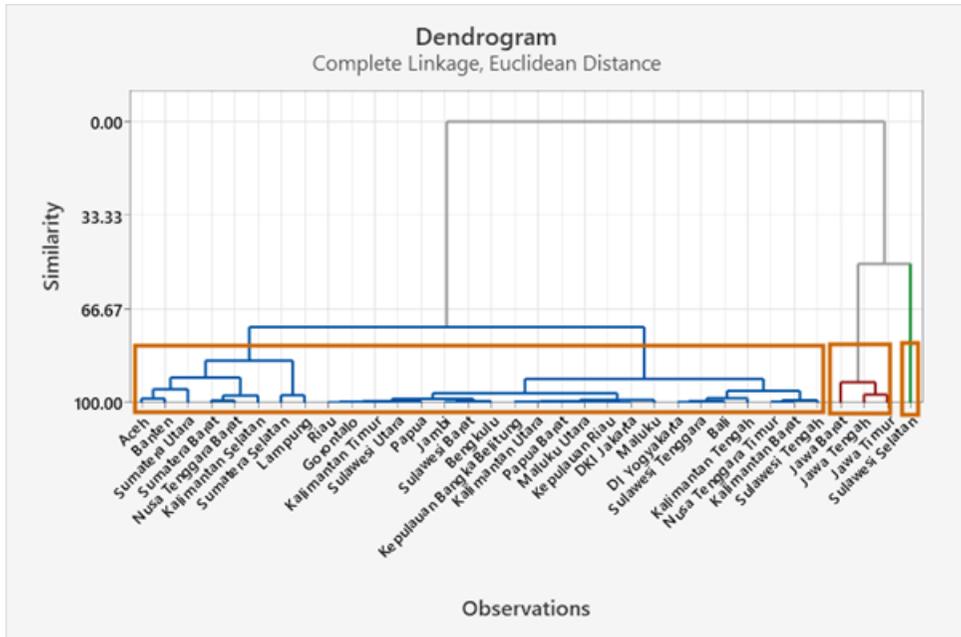
Gambar 3.1.1. Pola Panen Padi di Indonesia, 2019 - 2021

Sejalan dengan luas panen padi, perkembangan produksi padi dalam wujud gabah kering giling (GKG) tahun 2019 sampai 2021 juga cenderung fluktuatif yaitu 54,6 juta ton tahun 2019 kemudian sedikit meningkat menjadi 54,65 juta ton tahun 2020 dan menurun menjadi 54,42 juta ton tahun 2021. Hampir 88% produksi padi di Indonesia disumbang oleh 12 provinsi sentra. Provinsi sentra produksi padi didominasi oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 17,91% (setara 9,77 juta ton GKG), 17,57% (9,59 juta ton GKG), 16,63% (9,07 juta ton GKG), dan Sulawesi Selatan sebesar 9,08% (4,95 juta ton GKG). Sementara provinsi-provinsi lainnya hanya berkontribusi masing-masing dibawah 5% (Gambar 3.1.2).



Gambar 3.1.2. Provinsi Sentra Produksi Padi di Indonesia, 2019 - 2021

Bila dilakukan pengelompokan provinsi berdasarkan produksi padi tahun 2019-2021, terdapat 4 kelompok berdasarkan kemiripan produksinya, pada kelompok 1 atau produksi rendah terdapat 22 provinsi dengan produksi pada tahun 2021 antara 835 ton sampai dengan 867 ribu ton, berikutnya kelompok 2 atau produksi sedang terdapat di 8 provinsi dengan produksi 1,01 juta ton sampai 2,74 juta ton, selanjutnya kelompok 3 atau produksi tinggi terdapat 1 provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan dengan produksi 5,09 juta ton, dan kelompok 4 atau produksi sangat tinggi terdapat 3 provinsi yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dengan produksi antara 9,01 juta ton sampai 9,94 juta ton seperti tersaji pada Gambar 3.1.3.



Gambar 3.1.3. Pengelompokan Provinsi berdasarkan Produksi Padi, 2019-2021

Selanjutnya untuk produksi pangan lainnya, tahun 2021 terdapat 15 provinsi sentra dengan share diatas 80% terhadap produksi nasional, bahkan untuk bawang merah mencapai 95,06% dan tebu 97,92% seperti tersaji pada Tabel 3.1.1a dan Tabel 3.1.1b. Sentra produksi komoditas jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar masih didominasi oleh provinsi di wilayah Jawa yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, begitu juga komoditas komoditas cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih didominasi provinsi di wilayah Jawa ditambah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana Provinsi NTB untuk komoditas bawang putih tahun 2021 mencapai 20,45%. Sementara sentra produksi tebu disumbang oleh 2 provinsi utama yaitu Jawa Timur dan Lampung secara kumulatif mencapai 79,33%.

Tabel 3.1.1a. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas tanaman Pangan, 2021

No.	Provinsi	Jagung ¹⁾		Kedelai ¹⁾		Ubi Kayu ¹⁾		Ubi Jalar ¹⁾	
		2021*)	Share (%)	2021**)	Share (%)	2021***)	Share (%)	2021	Share (%)
1	Sumatera Utara	1.406.151,58	6,10	1.613	0,76	1.065.046,62	6,77	78.546	5,46
2	Sumatera Barat	734.696,25	3,19	8	0,00	145.846,90	0,93	131.594	9,15
3	Riau	18.851,81	0,08	957	0,45	100.623,36	0,64	4.468	0,31
4	Sumatera Selatan	730.268,49	3,17	332	0,16	248.866,80	1,58	22.564	1,57
5	Lampung	2.323.159,81	10,08	1.403	0,66	5.643.185,50	35,87	32.030	2,23
6	Jawa Barat	961.013,65	4,17	29.183	13,71	1.299.195,91	8,26	402.162	27,95
7	Jawa Tengah	2.989.058,45	12,97	46.860	22,01	2.863.289,24	18,20	131.572	9,15
8	Jawa Timur	5.710.095,61	24,78	78.521	36,89	1.618.905,27	10,29	282.499	19,64
9	Banten	39.348,64	0,17	1.686	0,79	51.273,03	0,33	12.688	0,88
10	Nusa Tenggara Barat	1.679.311,23	7,29	16.718	7,85	65.201,25	0,41	10.835	0,75
11	Kalimantan Barat	166.494,79	0,72	64	0,03	234.952,55	1,49	22.995	1,60
12	Kalimantan Tengah	84.491,60	0,37	14	0,01	59.450,71	0,38	6.463	0,45
13	Kalimantan Timur	73.215,04	0,32	99	0,05	52.072,15	0,33	12.221	0,85
14	Sulawesi Utara	1.655,98	0,01	3.500	1,64	58.060,58	0,37	21.851	1,52
15	Sulawesi Selatan	2.054.301,34	8,92	4.578	2,15	292.849,00	1,86	49.535	3,44
	Provinsi lainnya	4.070.651	17,67	27.327	12,84	1.932.150	12,28	216.680	15,06
	Indonesia	23.042.764,84	100,00	212.863	100,00	15.730.968,81	100,00	1.438.704	100,00
	Share Kumulatif 15 Provinsi		82,33		87,16		87,72		84,94

Sumber : Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian seluruh Indonesia

Keterangan : 1) Kualitas produksi jagung pipilan kering, kedelai biji kering, ubi kayu dan ubi jalar umbi basah,

*) Produksi Jagung merupakan angka prakiraan sangat sementara hasil konfirmasi ke daerah dan Dit. Serealia

**) Produksi kedelai berdasarkan angka estimasi dari Direktorat Aneka Kacang dan Umbi

***) Produksi ubikayu dan ubi jalar berdasarkan angka PDPS-Pusdatin

Tabel 3.1.1b. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Sayuran dan Tebu, 2021

No.	Provinsi	Cabe Merah		Cabe Rawit		Bawang Merah		Bawang Putih		Tebu ¹⁾	
		2021	Share (%)	2021	Share (%)	2021	Share (%)	2021	Share (%)	2021*)	Share (%)
1	Sumatera Utara	210.219,82	15,45	78.662,97	5,67	53.962	2,69	805	1,79	20.520,00	0,85
2	Sumatera Barat	115.765,98	8,51	35.117,92	2,53	200.366	10,00	1.839	4,08	-	-
3	Riau	14.097,24	1,04	6.693,87	0,48	329	0,02	0,00	0,00	-	-
4	Sumatera Selatan	23.555,63	1,73	11.562,44	0,83	1.125	0,06	36	0,08	107.017,00	4,42
5	Lampung	34.549,67	2,54	10.921,29	0,79	1.762	0,09	112	0,25	802.425,00	33,18
6	Jawa Barat	343.066,76	25,21	137.456,25	9,91	170.650	8,51	963	2,14	29.449,00	1,22
7	Jawa Tengah	169.282,41	12,44	179.286,91	12,93	564.255	28,15	25.545	56,65	177.261,00	7,33
8	Jawa Timur	127.429,02	9,37	578.883,00	41,75	500.992	24,99	4.220	9,36	1.116.135,00	46,15
9	Banten	6.405,69	0,47	3.993,26	0,29	1.190	0,06	0,60	0,00	-	-
10	Nusa Tenggara Barat	16.085,64	1,18	62.538,86	4,51	222.620	11,11	9.223	20,45	10.723,00	0,44
11	Kalimantan Barat	2.791,24	0,21	6.331,79	0,46	104	0,01	0	0,00	-	-
12	Kalimantan Tengah	1.711,31	0,13	6.961,43	0,50	34	0,00	0	0,00	-	-
13	Kalimantan Timur	5.916,38	0,43	8.367,13	0,60	72	0,00	0	0,00	-	-
14	Sulawesi Utara	9.041,87	0,66	17.370,63	1,25	4.986	0,25	11	0,02	-	-
15	Sulawesi Selatan	17.821,70	1,31	26.423,23	1,91	183.210	9,14	47	0,10	67.526,00	2,79
	Provinsi lainnya	262.831	19,32	215.876	15,57	98.935	4,94	2.291	5,08	87.533	3,62
	Indonesia	1.360.571,12	100,00	1.386.447	100,00	2.004.590	100,00	45.092	100,00	2.418.589	100,00
	Share Kumulatif 15 Provinsi		80,68		84,43		95,06		94,92		96,38

Sumber : Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian seluruh Indonesia

Keterangan : 1) Tebu wujud produksi gula kristal putih/hablur

*) Angka sementara

Sentra produksi daging sapi, daging ayam ras, daging ayam buras dan telur ayam juga dominan disumbang oleh provinsi di wilayah Jawa. Sementara provinsi sentra kelapa sawit berada di 2 pulau yaitu pulau Sumatera dan Kalimantan, yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan yang mendominasi produksi kelapa sawit Indonesia dengan kontribusi masing-masing sebesar 18,75%, 18,55%, 12,46%, 11,32%, 8,27%, dan 6,79% seperti tersaji pada Tabel 3.1.1c.

Tabel 3.1.1c. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Peternakan dan Kelapa Sawit, 2021

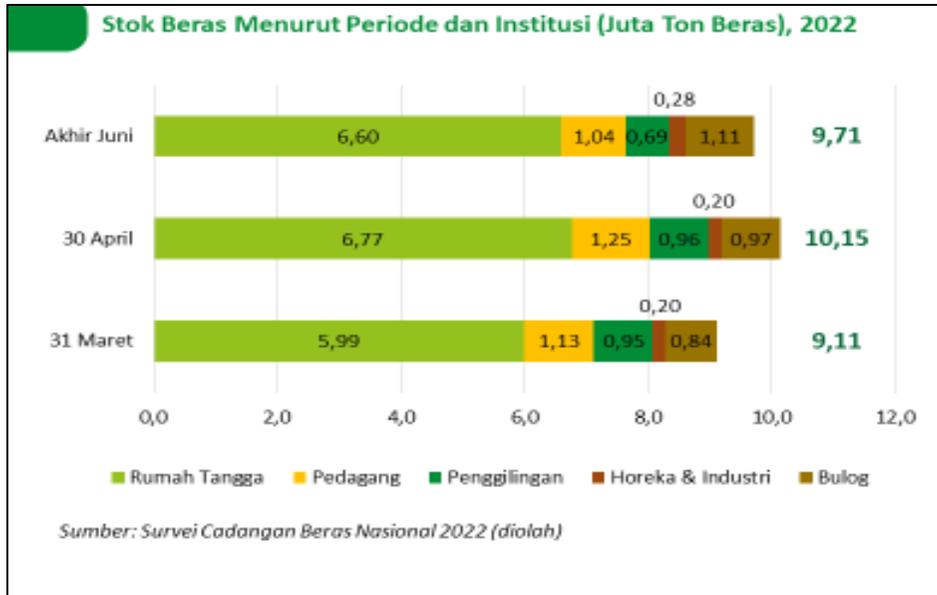
No.	Provinsi	Kelapa Sawit ¹⁾		Daging Sapi		Daging Ayam Ras		Daging Ayam Buras		Telur Ayam Ras	
		2021*)	Share (%)	2021	Share (%)	2021	Share (%)	2021	Share (%)	2021	Share (%)
1	Sumatera Utara	5.301.911,75	11,32	13.745,06	2,82	162.133,88	5,09	16.490,14	5,99	453.119	8,79
2	Sumatera Barat	1.351.949,50	2,89	21.375,13	4,38	51.509,00	1,62	5.339,61	1,94	303.345	5,88
3	Riau	8.785.326,58	18,75	8.948,70	1,83	90.038,57	2,83	1.481,14	0,54	4.067	0,08
4	Sumatera Selatan	3.181.389,56	6,79	13.832,62	2,84	110.078,14	3,46	7.493,82	2,72	185.928	3,61
5	Lampung	420.715,00	0,90	21.130,03	4,33	92.935,44	2,92	14.950,09	5,43	197.993	3,84
6	Jawa Barat	32.806,07	0,07	78.134,54	16,02	706.153,69	22,17	27.957,55	10,16	661.895	12,84
7	Jawa Tengah			65.150,77	13,36	621.718,06	19,52	25.634,47	9,31	735.884	14,27
8	Jawa Timur			108.284,07	22,20	433.757,08	13,62	40.540,99	14,73	1.475.886	28,62
9	Banten	30.092,38	0,06	17.933,48	3,68	188.116,60	5,91	5.101,23	1,85	235.099	4,56
10	Nusa Tenggara Barat			11.014,08	2,26	37.626,10	1,18	12.465,41	4,53	45.991	0,89
11	Kalimantan Barat	5.835.854,71	12,46	5.119,52	1,05	54.616,78	1,71	3.455,04	1,26	53.476	1,04
12	Kalimantan Tengah	8.690.794,65	18,55	3.965,53	0,81	34.400,60	1,08	2.576,29	0,94	8.396,73	0,16
13	Kalimantan Timur	3.874.299,65	8,27	7.319,28	1,50	61.612,11	1,93	5.324,06	1,93	30.229,35	0,59
14	Sulawesi Utara			3.103,44	0,64	11.775,30	0,37	2.946,09	1,07	33.302,47	0,65
15	Sulawesi Selatan	94.397,76	0,20	15.366,14	3,15	102.443,75	3,22	5.481,27	1,99	176.766,80	3,43
	Provinsi lainnya	9.254.920	20	93.380	19	426.783	13	98.047	36	554.619	10,76
	Indonesia	46.854.457	100,00	487.802	100,00	3.185.698	100,00	275.284	100,00	5.155.998	100,00
	Share Kumulatif 15 Provinsi	80,25		80,86		86,60		64,38		89,24	

Sumber : Ditjen Perkebunan serta Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Laporan perusahaan melalui sistem Perunggasan Nasional yang di ambil pada tanggal 6 Oktober 2022

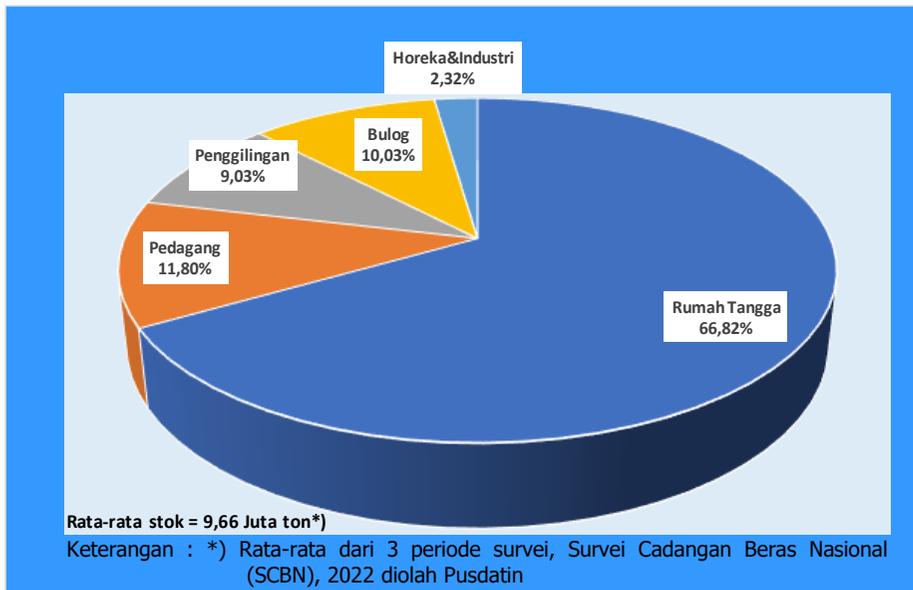
3.1.2. Stok Beras dan Pangan Strategis

Pengelolaan stok atau cadangan pangan bertujuan untuk mengantisipasi dan menangani masalah pangan, terutama untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang mencukupi, terdistribusi secara merata sepanjang waktu dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Menurut UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa stok/cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan di pemerintah dan masyarakat. Stok pangan merupakan jumlah pangan yang disimpan sebagai cadangan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan BPS dengan melakukan survei pada 3 periode yaitu tanggal 31 Maret, 30 April dan Akhir Juni 2022 dengan jumlah stok beras sebesar 9,11 juta ton (31 Maret), 10,15 juta ton (30 April) dan 9,71 juta ton (akhir Juni 2022). Urutan institusi yang menyimpan stok beras terbesar berada di rumah tangga (produsen dan konsumen), disusul kemudian di pedagang beras, Bulog, penggilingan dan di hotel, restoran dan catering (horeka) & Industri (Gambar 3.1.4). Sebaran stok beras tersebut, menunjukkan bahwa stok beras sebagian besar berada di masyarakat dengan lokasi stok beras utamanya adalah di rumah tangga produsen atau petani di susul kemudian di pedagang beras dan penggilingan, sementara stok beras di pemerintah berada di Bulog.



Gambar 3.1.4. Sebaran Stok Beras Menurut Periode dan Institusi, SCBN 2022



Gambar 3.1.5. Rata - Rata Sebaran Stok Beras, SCBN 2022

Rata-rata stok beras pada 3 (tiga) periode tersebut sebesar 9,66 juta ton, dengan sebaran stok di rumah tangga (produsen dan konsumen) sebesar 66,82%, disusul di pedagang 11,8%, di Bulog 10,04%, penggilingan 9,03%, horeka dan industri sebesar 2,32%, seperti tersaji dalam Gambar 3.1.5.

Bila kita cermati lebih rinci, besarnya stok di rumah tangga produsen dan konsumen tersebut, sebagian besar stok berada di rumah tangga produsen atau petani mencapai lebih dari 92% dan sebagian besar berupa gabah/GKG dan sisanya di rumah tangga konsumen berupa wujud beras. Besarnya rata-rata stok gabah per rumah tangga produsen sebesar 390 - 443 kg dan rata-rata stok beras di rumah tangga konsumen sekitar 9-10 kg.

Sementara stok beras di pemerintah adalah stok beras yang berada di Bulog yang tersebar di 26 Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia. Pada Gambar 3.1.6 terlihat pada awal tahun 2020 yakni Januari sd. Februari 2020 rata-rata stok beras berada di atas 1,5 juta ton, selanjutnya terlihat mulai Maret 2020 atau awal terjadinya masa Pandemi Covid-19 di Indonesia sampai dengan saat ini stok beras di Bulog memiliki pola stok pada 1 juta ton sampai dengan dibawah 1,5 juta ton dan saat ini posisi tersebut dianggap sebagai stok aman beras di Bulog. Meskipun sempat terjadi stok kurang dari 1 juta yaitu Desember 2020 sd Februari 2021 dan Januari sd April 2022 serta Agustus 2022 dan posisi Oktober 2022 menjadi sebesar 677.486 ton. Terjadinya penurunan stok di Bulog pada awal tahun 2021 sempat terjadi polemik untuk melakukan impor beras, disisi lain bulan Maret-April merupakan puncak panen raya padi di Indonesia, tentunya hal tersebut akan mempengaruhi harga dan penyerapan gabah petani nantinya, sehingga rencana impor beras tersebut tidak dilakukan dan terlihat juga harga beras selama periode tersebut relative stabil yang menunjukkan supply beras mencukupi. Hal ini juga sejalan dengan

prognosa neraca beras yang telah disusun Kementerian Pertanian, bahwa persediaan beras dalam negeri telah mencukupi kebutuhan beras masyarakat Indonesia setiap bulannya, bahkan surplus dan didukung juga oleh harga beras relatif stabil selama 3 tahun terakhir ini. Besarnya stok di Bulog saat ini masih aman meskipun di bawah 1 juta ton diduga karena Bulog mulai tahun 2019 tidak lagi memiliki program penyaluran beras seperti Raskin, dan Rastra, namun pada masa Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai Maret 2020, Bulog telah diberi tugas melalui penyaluran program bantuan sosial akibat Pandemi covid 19 bekerjasama dengan Kementerian Sosial, sehingga stok berasnya terlihat menurun atau terjadi pengeluaran stok berasnya.



Gambar 3.1.6. Sebaran Stok Beras di Bulog, Januari 2020 s.d Oktober 2022

3.1.3. *Import Dependency Ratio (IDR)* dan *Self Sufficiency Ratio (SSR)* Komoditas Pangan

Import Dependency Ratio (IDR) menggambarkan ketergantungan suatu negara terhadap impor suatu komoditas. Berdasarkan atas perhitungan nilai IDR beras seperti tersaji pada Tabel 3.1.2. menunjukkan pada periode tahun 2019 – 2021 supply beras Indonesia tergantung pada beras impor sangat kecil hanya 1,01% sampai 1,27%. Ketergantungan pada beras impor masih sangat kecil dan beras yang diimpor merupakan beras khusus seperti beras Japonika maupun basmati.

Tabel 3.1.2. *Import Dependency Ratio (IDR)* dan *Self Sufficiency Ratio (SSR)* Beras, 2019 - 2021

No	Uraian	Tahun (Ton)		
		2019	2020	2021
1	Produksi			
	- Gabah	54.604.033	54.649.202	54.415.294
	- Beras	34.957.502	34.986.419	34.836.671
2	Ekspor	1.075	852	3.753
3	Impor	449.824	356.556	407.891
4	Produksi + Impor - Ekspor	35.406.251	35.342.124	35.240.809
5	IDR (%)	1,27	1,01	1,16
6	SSR (%)	98,73	98,99	98,85

Sumber : BPS diolah Pusdatin

Keterangan : Produksi merupakan angka KSA, BPS
Konversi GKG ke beras sebesar 64,02% (SKGB, 2018)

Sementara, nilai *Self Sufficiency Ratio (SSR)* beras menunjukkan besarnya produksi beras dalam negeri kaitannya dengan kebutuhan beras untuk memenuhi konsumsi beras masyarakat. Nilai SSR komoditas beras Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021 mendekati 99% yang berarti bahwa sebagian besar kebutuhan beras Indonesia dapat dipenuhi oleh produksi domestik yang berarti Indonesia telah mencapai swasembada beras.

Selanjutnya terkait IDR dan SSR untuk komoditas pangan lainnya tahun 2019 - 2021 seperti tersaji dalam Tabel 3.1.3. menunjukkan terdapat 2 (dua) komoditas pangan utama yang memiliki nilai ketergantungan impor (IDR) relatif tinggi, kedelai sekitar 86% - 92% dan gula yang digunakan untuk bahan baku industri, sedangkan ketergantungan terhadap daging sapi impor sekitar 27% - 33%. Kedelai sebagai bahan baku pada industri tahu, tempe dan kecap memiliki nilai IDR yang cukup besar mencapai 86%-92% yang berarti ketergantungan Indonesia sebesar 86%-92% terhadap kedelai impor untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri dan sisanya dipenuhi dari kedelai lokal. Demikian juga pemenuhan kebutuhan gula yang utamanya dalam wujud *raw sugar* digunakan oleh industri makanan dan minuman memiliki nilai IDR sebesar 64%-73% dan sisanya dipenuhi dari gula lokal. Pemenuhan kebutuhan komoditas pangan utama lainnya seperti jagung (utama sebagai bahan pakan ternak), cabe, bawang merah, daging ayam dan telur ayam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri yang ditunjukkan dari nilai SSR mendekati 100%.

Tabel 3.1.3. *Import Dependency Ratio (IDR) dan Self Sufficiency Ratio (SSR) Pangan Lainnya, 2019 - 2021*

No.	Komoditas	IDR (%)			SSR (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Jagung	4,31	3,65	4,14	95,70	96,62	95,87
2	Kedelai	86,39	89,58	92,20	13,73	10,52	7,88
3	Cabe Merah	3,60	2,78	3,98	96,96	98,01	96,73
4	Bawang Merah	0,02	0,05	0,04	100,54	100,42	100,17
5	Gula	64,79	72,65	72,72	35,27	27,94	32,08
6	Daging Sapi	28,54	27,31	32,90	71,47	72,70	67,11
7	Daging Ayam	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01	100,00
8	Telur Ayam	0,04	0,04	0,04	95,03	97,06	99,96

Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian diolah Pusdatin

Keterangan : ekspor dan impor jagung dan kedelai dalam wujud segar

3.2. Aspek Keterjangkauan Pangan

Aspek keterjangkauan pangan merupakan salah satu dari 3 (tiga) pilar dalam ketahanan pangan. *Center for Indonesia Policy Studies (CIPS)* menilai Indonesia saat ini belum mencapai ketahanan pangan. Hal tersebut karena aspek keterjangkauan pangan bagi masyarakat dinilai kerap luput dari perhatian pemerintah. Titik berat aspek ini adalah pada tercapainya pemerataan distribusi pangan dari provinsi yang surplus ke wilayah yang defisit. BPS dalam menghitung Indeks Ketahanan pangan, untuk aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial didapat dari tiga indikator yaitu indikator pangan yang diproduksi di kecamatan, indikator tidak mengalami kesulitan menjangkau pembelian serta indikator harga pembelian tidak tinggi.

Ada beberapa indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan aspek keterjangkauan pangan ini, yaitu dengan melihat bagaimana pendapatan masyarakatnya, kemudian seperti apa pola konsumsinya dan terakhir bagaimana tingkat kemiskinan dapat diperbaiki di semua wilayah. Analisis dalam subbab ini akan mengulas secara deskriptif bagaimana capaian aspek keterjangkauan pangan dilihat dari pendapatan yang akan didekati dari pengeluaran untuk makanan per kapita, konsumsi pangan dan angka kemiskinan.

3.2.1. Pengeluaran dan Konsumsi

Pengeluaran per kapita masyarakat dari hasil Susenas BPS dibedakan menjadi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Analisis dalam subbab ini akan melihat pola pengeluaran makanan per kapita dalam sebulan. Ada 14 kelompok bahan makanan yang ditampilkan yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi

serta tembakau dan sirih. Pengeluaran untuk bahan makanan di wilayah perkotaan dan perdesaan tahun 2021 adalah sekitar 49,25% dari total pengeluaran per kapita dalam sebulan (Grafik 3.2.1).



Gambar 3.2.1. Pola Pengeluaran per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2021

Pengeluaran untuk bahan makanan ini secara total untuk wilayah perkotaan dan perdesaan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 622.845,- (tabel 3.2.1). Pengeluaran ini meningkat 3,25% dari tahun 2020. Laju peningkatan tertinggi adalah pada kelompok umbi-umbian yaitu sebesar 23,27%. Sementara terendah pada kelompok telur dan susu yaitu 1,09%. Kelompok buah-buahan dan makanan minuman jadi mencatat laju penurunan dibandingkan tahun 2021. Pengeluaran untuk buah-buahan turun 12,87% dan 4,38% untuk makanan dan minuman jadi.

Tabel 3.2.1. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2017 – 2021

(Rupiah)

No.	Bahan Makanan	Perkotaan+Perdesaan					Pertumb. 2020-2021 (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Padi-padian	61.455	66.936	64.961	66.789	69.786	4,49
2	Umbi-umbian	5.764	5.623	5.886	6.361	7.841	23,27
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	40.478	43.352	45.304	46.570	51.514	10,62
4	Daging	24.987	23.006	24.783	26.441	29.539	11,72
5	Telur dan Susu	29.357	32.196	32.435	34.860	35.241	1,09
6	Sayur-sayuran	42.397	39.664	37.898	45.393	53.864	18,66
7	Kacang-kacangan	11.252	11.292	11.273	11.654	13.075	12,19
8	Buah-buahan	22.850	28.486	27.444	30.116	26.240	-12,87
9	Minyak dan Kelapa	13.588	13.527	13.211	14.155	16.111	13,82
10	Bahan Minuman	17.078	17.162	16.823	18.337	19.464	6,15
11	Bumbu-bumbuan	9.656	10.755	10.830	11.810	13.593	15,10
12	Bahan Makanan Lainnya	10.909	10.238	10.061	10.574	12.314	16,46
13	Makanan dan Minuman Jadi	172.600	189.223	201.107	206.736	197.682	-4,38
14	Rokok dan Tembakau	65.586	65.439	70.537	73.442	76.583	4,28
	Jumlah Makanan	527.956	556.899	572.551	603.236	622.845	3,25

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Tahun 2021, pangsa pengeluaran terbesar untuk bahan makanan adalah kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 31,74% dari total pengeluaran untuk makanan. Pangsa terkecil adalah umbi-umbian yang hanya 1,26% saja dari total pengeluaran untuk makanan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam grafik ini adalah pengeluaran untuk tembakau dan sirih yang mencapai 12,30% dan menjadi pengeluaran terbesar kedua setelah makanan dan minuman jadi. Sementara pangsa pengeluaran untuk padi-padian yang merupakan makanan pokok menempati urutan ketiga yaitu sebesar 11,20%. Pangsa pengeluaran untuk ikan, telur dan susu serta sayuran relatif tinggi dengan persentase sekitar 6% - 8%. Sementara

pengeluaran lainnya di bawah 5%, di antaranya daging 4,74% dan buah-buahan 4,21% serta kelompok lainnya (Gambar 3.2.2).



Gambar 3.2.2. Pola Pengeluaran Bahan Makanan per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2021

Pola pengeluaran bahan makanan pada Gambar 3.2.2 secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Dalam masyarakat modern saat ini, konsumsi makanan dan minuman jadi menjadi penciri yang utama. Banyaknya restoran siap saji bahkan sampai ke pelosok perdesaan mengakibatkan tingkat konsumsinya menjadi tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Keluarga modern saat ini cenderung ingin serba praktis dan meninggalkan kebiasaan memasak di rumah. Hal ini terutama karena tuntutan kehidupan yang ada dimana banyak ibu bekerja lebih memilih membeli makanan siap saji.

Untuk melihat situasi ketahanan pangan suatu wilayah maka konsumsi pangan pokok akan dapat tergambar dalam pangsa pengeluaran komoditas pangan yang relatif tinggi. Pada Gambar 3.2.2 dimana pangsa

pengeluaran untuk rokok yang lebih tinggi dari pangan pokok dapat menjadi pemicu bagi semua pihak dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat yang secara tidak langsung akan berdampak pada situasi ketahanan pangannya.

Tabel 3.2.2. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan, 2017 – 2021

(Rupiah)

No.	Bahan Makanan	Perkotaan					Pertumb. 2020-2021 (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Padi-padian	54.853	60.785	59.291	61.026	65.058	6,61
2	Umbi-umbian	5.012	4.954	5.156	5.709	6.715	17,62
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	43.206	46.753	48.782	50.046	54.559	9,02
4	Daging	31.054	28.297	29.670	31.346	34.129	8,88
5	Telur dan Susu	36.385	39.670	39.021	42.026	42.111	0,20
6	Sayur-sayuran	43.178	40.522	38.316	46.252	54.678	18,22
7	Kacang-kacangan	12.007	11.966	12.006	12.350	13.994	13,31
8	Buah-buahan	27.531	34.018	31.979	34.908	30.832	-11,68
9	Minyak dan Kelapa	13.398	13.227	13.076	13.812	15.785	14,28
10	Bahan Minuman	16.773	16.621	16.381	17.781	18.846	5,99
11	Bumbu-bumbuan	10.052	11.251	11.146	12.261	14.102	15,02
12	Bahan Makanan Lainnya	11.768	10.910	10.735	11.384	13.285	16,70
13	Makanan dan Minuman Jadi	220.882	237.325	251.129	257.945	242.214	-6,10
14	Rokok dan Tembakau	63.984	64.663	70.444	73.457	74.970	2,06
	Jumlah Makanan	590.082	620.962	637.132	670.304	681.278	1,64

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Tabel 3.2.2 menyajikan perkembangan pengeluaran untuk konsumsi bahan makanan di perkotaan tahun 2017 – 2021. Tahun 2021 pengeluaran untuk total bahan makanan di wilayah perkotaan adalah sebesar Rp 681.278,. Pengeluaran ini cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan naiknya inflasi yang berimbas kepada harga bahan makanan. Sementara di wilayah perdesaan pengeluaran untuk

bahan makanan adalah sekitar Rp 545.942,- dengan kecenderungan yang juga meningkat setiap tahunnya (Tabel 3.2.3). Pengeluaran untuk bahan makanan di perdesaan ini sekitar 20% lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan. Laju pertumbuhan pengeluaran untuk makanan setahun terakhir di wilayah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hal ini bisa mengindikasikan inflasi perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Tabel 3.2.3. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perdesaan, 2017 – 2021

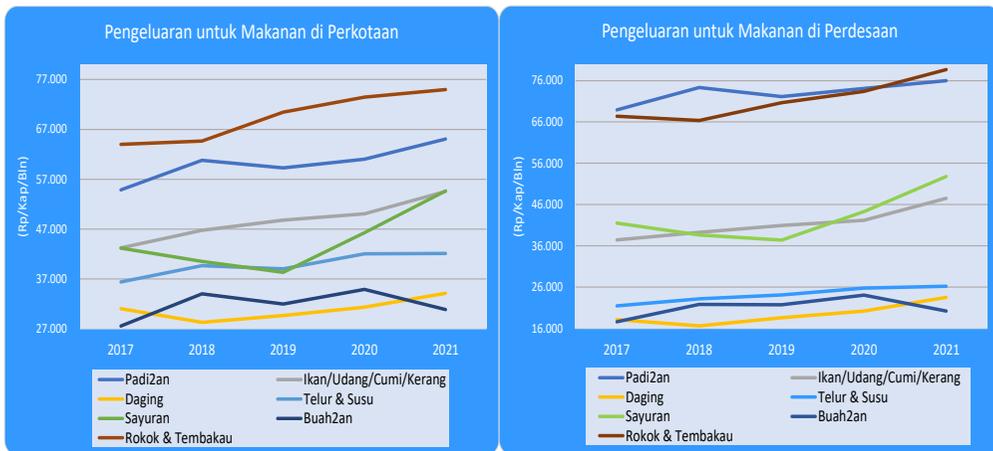
No.	Bahan Makanan	Perdesaan					Pertumb. 2020-2021 (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Padi-padian	68.895	74.362	72.142	74.107	76.008	2,57
2	Umbi-umbian	6.611	6.430	6.811	7.189	9.323	29,68
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	37.402	39.246	40.898	42.156	47.505	12,69
4	Daging	18.150	16.617	18.592	20.211	23.498	16,26
5	Telur dan Susu	21.435	23.174	24.093	25.761	26.200	1,70
6	Sayur-sayuran	41.517	38.628	37.369	44.303	52.793	19,16
7	Kacang-kacangan	10.401	10.478	10.344	10.770	11.865	10,17
8	Buah-buahan	17.574	21.808	21.701	24.031	20.197	-15,95
9	Minyak dan Kelapa	13.803	13.890	13.381	14.591	16.539	13,35
10	Bahan Minuman	17.421	17.815	17.383	19.042	20.278	6,49
11	Bumbu-bumbuan	9.210	10.157	10.430	11.236	12.923	15,01
12	Bahan Makanan Lainnya	9.941	9.427	9.206	9.545	11.036	15,62
13	Makanan dan Minuman Jadi	118.177	131.149	137.750	141.710	139.073	-1,86
14	Rokok dan Tembakau	67.391	66.376	70.654	73.422	78.705	7,20
	Jumlah Makanan	457.927	479.557	490.754	518.073	545.942	5,38

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Jika data pengeluaran untuk bahan makanan ini disandingkan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, ada beberapa perbedaan yang sangat nyata dan menarik untuk dicermati. Dalam grafik ini pengeluaran yang disajikan adalah komoditas pertanian dengan pangsa yang relatif besar yaitu padi-padian, ikan, daging, telur susu, sayuran dan buah-buahan. Pengeluaran untuk tembakau dan sirih sengaja ditambahkan

untuk melihat keragaannya. Gambar 3.2.3 terlihat bahwa di wilayah perkotaan pengeluaran untuk tembakau dan sirih menduduki peringkat pertama, sementara di perdesaan kelompok padi-padian berada pada urutan pengeluaran teratas kecuali tahun 2021 terjadi pergeseran.

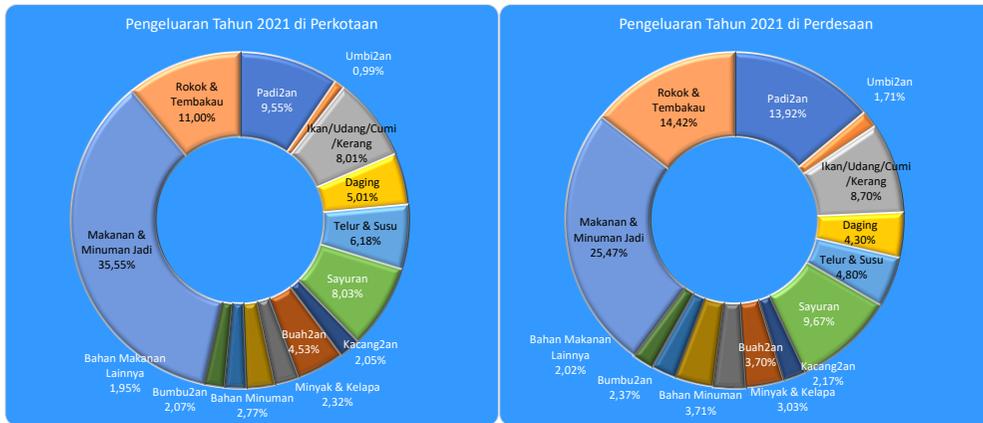
Pengeluaran untuk makanan di perkotaan cenderung merata untuk semua bahan makanan ini dengan terlihat garis yang ada tidak mengelompok secara tegas atau cukup menyebar. Sementara di perdesaan pengeluaran untuk makanan cenderung mengelompok menjadi 3 yaitu kelompok atas untuk padi-padian dan rokok, kelompok tengah untuk ikan dan sayuran, dan kelompok bawah untuk daging, telur susu dan buah-buahan.



Gambar 3.2.3. Perkembangan Pola Pengeluaran menurut Kelompok Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2021

Kelompok ikan dan sayuran baik di perkotaan dan perdesaan menempati peringkat yang sama, namun di perkotaan pengeluaran untuk telur dan susu juga seimbang. Pengeluaran untuk telur dan susu di perdesaan cenderung lebih rendah dan hampir sama dengan pengeluaran untuk daging serta buah-buahan. Hal ini mengindikasikan peluang perbaikan konsumsi di perdesaan dapat diarahkan kepada konsumsi telur dan susu serta buah-buahan. Kemampuan wilayah perdesaan untuk dapat

mencukupi telur, susu dan buah-buahan sangat besar untuk dapat ditingkatkan.



Gambar 3.2.4. Pola Pengeluaran Bahan Makanan per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2021

Konsumsi buah-buahan dan sayuran di perkotaan juga dapat ditingkatkan untuk memperbaiki pola konsumsi yang lebih sehat. Jika dilihat pada grafik tersebut pola konsumsi perkotaan cenderung tinggi protein dimana pengeluaran untuk ikan, telur dan susu cukup besar. Pengeluaran untuk daging di wilayah perkotaan relatif rendah, diperkirakan karena masyarakat perkotaan mengkonsumsi daging dalam bentuk siap saji sehingga pengeluarannya masuk ke dalam pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi (Gambar 3.2.4).

Jika dilihat angka partisipasi konsumsi tahun 2021 beberapa bahan makanan, beras sebagai pangan pokok dikonsumsi oleh 97,66% masyarakat. Tingkat partisipasi pangan pokok sumber karbohidrat lainnya seperti singkong, ubi jalar dan kentang berturut-turut adalah 30,17%, 15,44% dan 28,42%. Jagung basah dengan kulit atau biasa disebut jagung muda dalam kelompok padi-padian tingkat partisipasi konsumsinya sekitar 11,4%. Konsumsi tepung terigu juga cukup tinggi yaitu 36,41% dan ini

belum termasuk konsumsi mie yang bahan bakunya tepung terigu juga (Tabel 3.2.4).

Sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah telur ayam ras dengan tingkat partisipasi konsumsi 87,18%, sementara daging ayam sekitar 52,48%. Daging sapi tingkat partisipasi konsumsinya relatif masih rendah yaitu 6,63%. Susu yang banyak dikonsumsi sebagai sumber protein lainnya adalah susu kental manis yang secara medis tidak terlalu baik untuk kesehatan, sebesar 22,17%. Susu bubuk pabrikan tingkat partisipasi konsumsinya yaitu sekitar 9,23%.

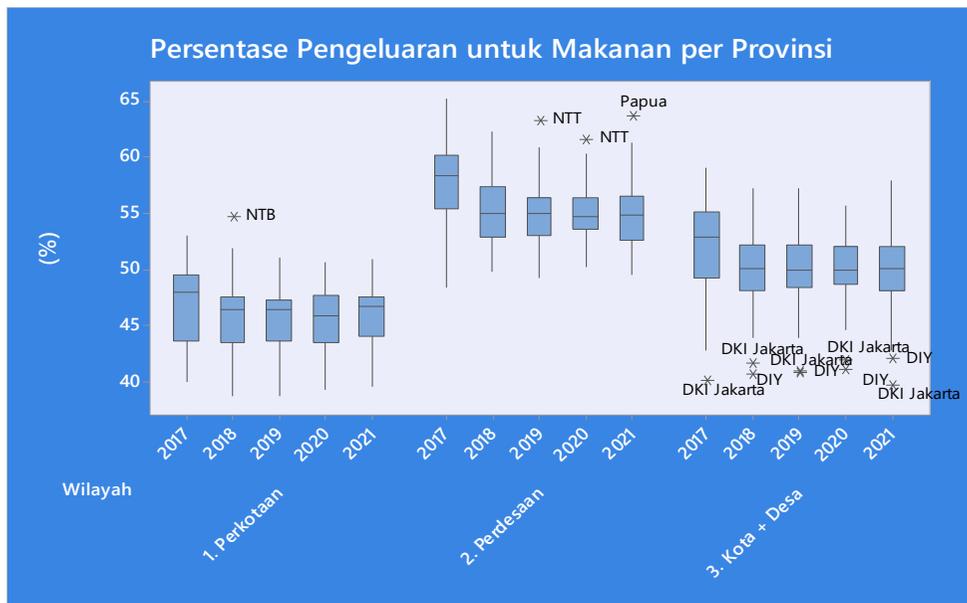
Tabel 3.2.4. Tingkat Partisipasi Beberapa Bahan Makanan, 2017 - 2021

No.	Jenis Komoditas	Partisipasi Konsumsi Penduduk Indonesia (%)					Pertumb. 2020-2021 (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Padi-padian						
	Beras	96,65	96,97	96,82	96,95	97,66	0,73
	Jagung basah dengan kulit	8,02	9,26	11,90	15,07	11,40	-24,35
	Tepung terigu	34,42	34,35	34,03	33,62	36,41	8,30
2	Umbi-umbian						
	Ketela pohon/singkong	29,58	22,34	21,55	24,00	30,17	25,71
	Ketela rambat/ubi jalar	14,02	11,73	12,25	12,27	15,44	25,84
	Kentang	23,13	23,56	27,66	26,72	28,42	6,36
3	Daging						
	Daging sapi	6,58	6,76	7,17	6,99	6,63	-5,15
	Daging ayam ras	47,97	46,73	48,82	50,43	52,48	4,07
4	Telur dan Susu						
	Telur ayam ras	83,04	83,18	85,28	86,94	87,18	0,28
	Susu kental manis	26,43	25,42	22,50	22,01	22,17	0,73
	Susu bubuk	9,64	10,18	10,35	10,28	9,23	-10,21
5	Sayur-sayuran						
	Bawang merah	89,92	90,05	90,39	90,87	91,65	0,86
	Bawang putih	86,15	86,65	87,56	87,88	89,20	1,50
	Cabai merah	54,27	54,04	56,19	54,31	53,70	-1,12
	Cabai rawit	68,98	70,45	71,81	72,98	72,89	-0,12
6	Kacang-Kacangan						
	Tahu	72,68	72,95	73,59	74,03	74,94	1,23
	Tempe	74,71	75,06	75,41	75,61	76,28	0,89
7	Buah-Buahan						
	Jeruk, jeruk bali	27,07	24,09	32,02	25,19	30,68	21,79
	Salak	17,55	14,51	12,16	11,00	11,84	7,64
8	Minyak dan Kelapa						
	Minyak Kelapa	6,78	8,17	7,24	6,33	7,09	12,01
	Minyak Goreng (kelapa sawit, bunga matahari)	87,79	87,14	87,98	89,08	89,21	0,15
	Kelapa (tidak termasuk santan instan)	28,54	26,61	26,25	25,61	24,79	-3,20
9	Bahan Minuman						
	Gula Pasir	89,94	89,18	89,99	90,07	90,82	0,83
	Gula Merah, gula air	20,26	19,83	19,94	20,24	21,09	4,20
10	Bumbu-bumbuan						
	Garam	94,84	94,51	94,40	94,61	95,52	0,96
	Kecap	60,88	56,90	55,80	56,69	57,46	1,36

Sumber: Susenas Maret, 2017-2021, BPS, diolah Pusdatin

Kedelai yang termasuk kelompok kacang-kacangan banyak dikonsumsi dalam bentuk tahu dan tempe sebagai pangan tradisional Indonesia, dengan tingkat partisipasi konsumsinya masing-masing sebesar 74,94% dan 76,28%. Bahan pangan lainnya dengan tingkat partisipasi konsumsi yang tinggi adalah minyak goreng sawit (89,21%), gula pasir (90,82%) dan garam 95,52). Bawang dan cabai sebagai pelengkap masakan masuk ke dalam kelompok sayur-sayuran, tingkat partisipasi konsumsinya di atas 50%. Sementara tingkat konsumsi buah-buahan yang relatif tinggi dalam kelompoknya adalah jeruk (30,68%). Secara lengkap tingkat partisipasi konsumsi bahan pangan dapat dilihat pada Tabel 3.2.4.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah pencapaian ketahanan pangan juga perlu didukung dengan peningkatan kualitas dari sisi kesehatan untuk bahan pangan yang dikonsumsi. Komposisi nilai gizi yang lengkap serta keamanan pangan menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Penganekaragaman pangan perlu dikembangkan supaya komoditas substitusi dan komplementer dapat lebih dikembangkan.



Gambar 3.2.5. Boxplot Persentase Pengeluaran untuk Makanan Menurut Provinsi, 2017 – 2021

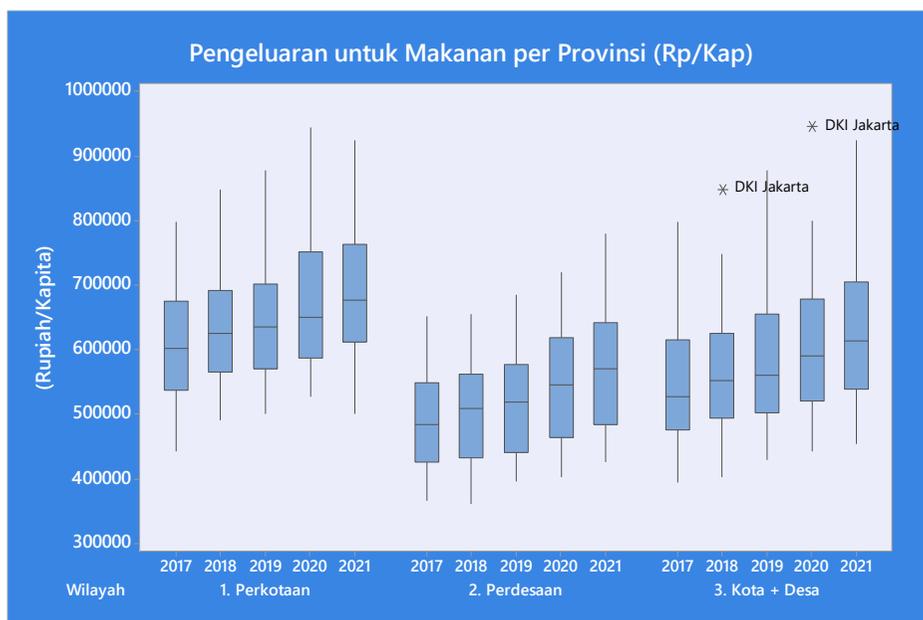
Jika pengeluaran untuk makanan ini dicermati menurut provinsi maka dapat dilihat provinsi mana yang tingkat pengeluaran untuk makanannya tertinggi dan terendah. Gambar 3.2.5 menunjukkan grafik boxplot persentase pengeluaran untuk makanan dibandingkan total pengeluaran di 34 provinsi. Untuk wilayah perkotaan, DKI Jakarta merupakan daerah dengan persentase pengeluaran untuk makanannya relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Untuk total wilayah perkotaan + perdesaan DKI juga merupakan pencilan bawah bersama DI Yogyakarta pada periode 2017 – 2021.

Pengeluaran untuk makanan dapat menjadi indikator kesejahteraan suatu daerah. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan ini juga berdampak pada kondisi ketahanan pangannya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah perkotaan merupakan provinsi dengan pengeluaran untuk makanan relatif tinggi dibandingkan provinsi lain. Tahun 2018 bahkan Nusa Tenggara Barat merupakan pencilan atas untuk wilayah perkotaannya, dimana persentase pengeluaran untuk makanannya sebesar 54,68% dari total pengeluaran. Sementara

untuk wilayah perdesaan, Nusa Tenggara Timur dan Papua merupakan pencilan tinggi di tahun 2019 – 2021. Namun secara total perkotaan dan perdesaan, baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur tidak masuk ke dalam kategori ekstrim atau pencilan atas (Gambar 3.2.5).



Gambar 3.2.6. Boxplot Pengeluaran untuk Makanan menurut Provinsi, 2017 – 2021

Jika dilihat nilai absolutnya untuk pengeluaran per kapita selama sebulan, seluruh provinsi cenderung stabil dengan laju meningkat. Di wilayah perkotaan atau perdesaan tidak ada provinsi dengan data yang ekstrim dibandingkan provinsi lainnya. Namun jika dilihat total perkotaan dan perdesaan, DKI Jakarta merupakan provinsi yang cukup ekstrim tinggi dibandingkan provinsi lain (Gambar 3.2.6). Pengeluaran per kapita dalam sebulan untuk makanan di DKI Jakarta pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 923.933,- turun 2,20% dibandingkan tahun 2020 (Tabel 3.2.5).

Tabel 3.2.5. Pengeluaran untuk Makanan menurut Provinsi, 2017 – 2021

No.	Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					Pertumb. 2020-2021 (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Aceh	529.162	547.668	559.303	595.635	643.591	8,05
2	Sumatera Utara	522.766	554.754	576.349	598.245	607.812	1,60
3	Sumatera Barat	584.045	604.871	609.232	644.853	668.029	3,59
4	Riau	603.401	599.873	621.802	668.074	672.143	0,61
5	Jambi	538.360	555.989	560.577	590.173	613.753	4,00
6	Sumatera Selatan	507.673	503.297	498.969	535.136	579.032	8,20
7	Bengkulu	523.329	548.879	542.474	573.500	580.273	1,18
8	Lampung	467.940	478.452	484.765	503.976	539.964	7,14
9	Kepulauan Bangka Belitung	721.045	710.401	751.665	771.121	783.204	1,57
10	Kepulauan Riau	759.544	747.944	789.143	800.424	828.206	3,47
11	DKI Jakarta	797.828	847.847	877.538	944.687	923.933	-2,20
12	Jawa Barat	562.767	600.967	629.765	655.838	677.383	3,29
13	Jawa Tengah	421.515	460.891	469.403	496.173	519.009	4,60
14	DI Yogyakarta	490.249	529.012	546.474	579.279	594.622	2,65
15	Jawa Timur	476.861	502.761	502.857	521.577	557.791	6,94
16	Banten	623.084	672.918	702.350	756.673	744.893	-1,56
17	Bali	569.168	599.976	609.238	675.146	628.472	-6,91
18	Nusa Tenggara Barat	457.616	525.091	539.844	574.202	637.898	11,09
19	Nusa Tenggara Timur	399.251	402.922	429.471	442.700	468.252	5,77
20	Kalimantan Barat	519.469	535.534	561.144	584.259	603.291	3,26
21	Kalimantan Tengah	621.622	632.493	650.809	675.948	713.145	5,50
22	Kalimantan Selatan	612.237	626.241	628.932	675.979	701.228	3,74
23	Kalimantan Timur	663.535	702.905	724.379	790.469	736.465	-6,83
24	Kalimantan Utara	667.280	671.612	717.782	743.894	742.834	-0,14
25	Sulawesi Utara	594.833	560.514	568.026	590.062	612.972	3,88
26	Sulawesi Tengah	480.987	474.811	505.591	516.839	512.309	-0,88
27	Sulawesi Selatan	450.618	495.465	487.898	516.183	533.482	3,35
28	Sulawesi Tenggara	409.857	457.497	475.206	506.740	509.723	0,59
29	Gorontalo	441.999	423.926	452.994	476.069	529.729	11,27
30	Sulawesi Barat	393.943	433.929	445.400	457.059	453.031	-0,88
31	Maluku	485.033	491.426	507.233	532.135	536.327	0,79
32	Maluku Utara	486.734	502.810	514.276	537.605	556.903	3,59
33	Papua Barat	551.032	614.330	667.696	687.944	698.303	1,51
34	Papua	638.354	623.987	665.301	723.821	792.781	9,53
	INDONESIA	527.956	556.899	572.551	603.236	622.845	3,25

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Provinsi dengan pengeluaran untuk makanan terendah tahun 2021 adalah provinsi Sulawesi Barat yaitu Rp. 453.031,- atau turun 0,88% dibandingkan tahun 2020. Hal yang perlu dicermati di sini adalah pertumbuhan atau laju kenaikan pengeluaran dibandingkan tahun

sebelumnya. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi dengan laju kenaikan tertinggi yaitu sekitar 11,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi lainnya dengan laju kenaikan pengeluaran relatif tinggi di atas 11% adalah Nusa Tenggara Barat (Tabel 3.2.5). Hal ini disinyalir karena tingginya harga pangan sehingga inflasi yang terjadi juga cukup tinggi. Harga pangan yang tinggi sangat mempengaruhi aspek keterjangkauan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Besar pengeluaran suatu daerah berbanding lurus dengan tingkat biaya hidupnya. Hal ini dapat dilihat pada total pengeluaran di DKI Jakarta yang cenderung paling tinggi dibandingkan provinsi lain. Pengeluaran untuk makanan di DKI tertinggi dibandingkan provinsi lain, namun secara proporsi justru paling rendah. Situasi pandemi tahun 2020-2021 diperkirakan mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Jika dicermati lebih jauh dari perubahan pola pengeluaran untuk makanannya, pandemi yang terjadi mempengaruhi kondisi ketahanan pangan suatu daerah.

3.2.2. Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia dihitung BPS dengan menggunakan data yang bersumber dari Susenas. Kategori kemiskinan dalam hal ini didasarkan pada penentuan batas berupa Garis Kemiskinan. Garis ini merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Perkembangan jumlah penduduk miskin tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin 2018 mencapai 25,95 juta orang, kemudian menurun tahun 2019 menjadi 25,14 juta orang, kemudian dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 26,42 juta orang, dan tahun 2021

jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat 27,54 juta. Penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 26,16 juta orang atau menurun 5,02% dibandingkan tahun 2021. Penurunan kemiskinan ini tidak lepas dari pemulihan ekonomi yang berlangsung sejak tahun 2021. Menurut kepulauan, Jawa memiliki 13,85 juta orang penduduk miskin pada Maret 2022. Jumlah ini setara 52,96% dari total warga miskin (Tabel 3.2.6).

Jumlah penduduk miskin tertinggi tahun 2022 adalah di Provinsi Jawa Timur sebesar 4,18 juta orang, kedua di Provinsi Jawa Barat sebesar 4,07 juta orang dan ketiga di Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,83 juta orang. Urutan berikutnya adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,26 juta orang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,13 juta orang. Usaha pemerintah dan masyarakat untuk terus mengentaskan kemiskinan makin menunjukkan hasil positif. Keberhasilan pembangunan manusia dan ekonomi secara nyata berdampak pada menurunnya jumlah kemiskinan di Indonesia.

Tabel 3.2.6. Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi, 2018 – 2022

No.	Provinsi	Tahun					Pertumb. 2021-2022 (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	839,49	819,44	814,91	834,24	806,82	-3,29
2	Sumatera Utara	1.324,98	1.282,04	1.283,29	1.343,86	1.268,19	-5,63
3	Sumatera Barat	357,13	348,22	344,23	370,67	335,21	-9,57
4	Riau	500,44	490,72	483,39	500,81	485,03	-3,15
5	Jambi	281,69	274,32	277,80	293,86	279,37	-4,93
6	Sumatera Selatan	1.068,27	1.073,74	1.081,58	1.113,76	1.044,69	-6,20
7	Bengkulu	301,81	302,30	302,58	306,00	297,23	-2,87
8	Lampung	1.097,05	1.063,66	1.049,32	1.083,93	1.002,41	-7,52
9	Kepulauan Bangka Belitung	76,26	68,38	68,39	72,71	66,78	-8,16
10	Kepulauan Riau	131,68	128,46	131,97	144,46	151,68	5,00
11	DKI Jakarta	373,12	365,55	480,86	501,92	502,04	0,02
12	Jawa Barat	3.615,79	3.399,16	3.920,23	4.195,34	4.070,98	-2,96
13	Jawa Tengah	3.897,20	3.743,23	3.980,90	4.109,75	3.831,44	-6,77
14	DI Yogyakarta	460,10	448,47	475,72	506,45	454,76	-10,21
15	Jawa Timur	4.332,59	4.112,25	4.419,10	4.572,73	4.181,29	-8,56
16	Banten	661,36	654,46	775,99	867,23	814,02	-6,14
17	Bali	171,76	163,85	165,19	201,97	205,68	1,84
18	Nusa Tenggara Barat	737,46	735,96	713,89	746,66	731,94	-1,97
19	Nusa Tenggara Timur	1.142,17	1.146,32	1.153,76	1.169,31	1.131,62	-3,22
20	Kalimantan Barat	387,08	378,41	366,77	367,89	350,25	-4,79
21	Kalimantan Tengah	136,93	134,59	132,94	140,04	145,10	3,61
22	Kalimantan Selatan	189,03	192,48	187,87	208,11	195,70	-5,96
23	Kalimantan Timur	218,90	219,92	230,26	241,77	236,25	-2,28
24	Kalimantan Utara	50,35	48,78	51,79	52,86	49,46	-6,43
25	Sulawesi Utara	193,31	191,70	192,37	196,35	185,14	-5,71
26	Sulawesi Tengah	420,21	410,36	398,73	404,44	388,35	-3,98
27	Sulawesi Selatan	792,63	767,80	776,83	784,98	777,44	-0,96
28	Sulawesi Tenggara	307,10	302,58	301,82	318,70	309,79	-2,80
29	Gorontalo	198,51	186,03	185,02	186,29	185,44	-0,46
30	Sulawesi Barat	151,78	151,40	152,02	157,19	165,72	5,43
31	Maluku	320,08	317,69	318,18	321,81	290,57	-9,71
32	Maluku Utara	81,46	84,60	86,37	87,16	79,87	-8,36
33	Papua Barat	214,47	211,50	208,58	219,07	218,78	-0,13
34	Papua	917,63	926,36	911,37	920,44	922,12	0,18
	Indonesia	25.949,80	25.144,72	26.424,02	27.542,77	26.161,16	-5,02

Sumber: BPS, Susenas bulan Maret

Data kemiskinan akan lebih bermakna jika disajikan dalam persentase terhadap total jumlah penduduk. Hal ini dapat menggambarkan seberapa besar kemiskinan di suatu daerah. Persentase penduduk miskin perkotaan tahun 2022 turun menjadi 7,50%, sementara persentase penduduk miskin perdesaan turun menjadi 12,29 persen. Tiga provinsi dengan jumlah dan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Papua (26,56%), Papua Barat (21,33%) dan NTT (20,05%). Sementara provinsi dengan persentase penduduk miskin di bawah 5% adalah Kepulauan Bangka Belitung (4,45%), Kalimantan Selatan (4,49), Bali (4,57) dan DKI Jakarta (4,69%). Secara rinci persentase penduduk miskin menurut provinsi untuk total perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Tabel 3.2.7.

Tabel 3.2.7. Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi, 2018 – 2022

No.	Provinsi	Tahun					Pertumb. 2021-2022 (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	15,97	15,32	14,99	15,33	14,64	-4,50
2	Sumatera Utara	9,22	8,83	8,75	9,01	8,42	-6,55
3	Sumatera Barat	6,65	6,42	6,28	6,63	5,92	-10,71
4	Riau	7,39	7,08	6,82	7,12	6,78	-4,78
5	Jambi	7,92	7,60	7,58	8,09	7,62	-5,81
6	Sumatera Selatan	12,80	12,71	12,66	12,84	11,90	-7,32
7	Bengkulu	15,43	15,23	15,03	15,22	14,62	-3,94
8	Lampung	13,14	12,62	12,34	12,62	11,57	-8,32
9	Kepulauan Bangka Belitung	5,25	4,62	4,53	4,90	4,45	-9,18
10	Kepulauan Riau	6,20	5,90	5,92	6,12	6,24	1,96
11	DKI Jakarta	3,57	3,47	4,53	4,72	4,69	-0,64
12	Jawa Barat	7,45	6,91	7,88	8,40	8,06	-4,05
13	Jawa Tengah	11,32	10,80	11,41	11,79	10,93	-7,29
14	DI Yogyakarta	12,13	11,70	12,28	12,80	11,34	-11,41
15	Jawa Timur	10,98	10,37	11,09	11,40	10,38	-8,95
16	Banten	5,24	5,09	5,92	6,66	6,16	-7,51
17	Bali	4,01	3,79	3,78	4,53	4,57	0,88
18	Nusa Tenggara Barat	14,75	14,56	13,97	14,14	13,68	-3,25
19	Nusa Tenggara Timur	21,35	21,09	20,90	20,99	20,05	-4,48
20	Kalimantan Barat	7,77	7,49	7,17	7,15	6,73	-5,87
21	Kalimantan Tengah	5,17	4,98	4,82	5,16	5,28	2,33
22	Kalimantan Selatan	4,54	4,55	4,38	4,83	4,49	-7,04
23	Kalimantan Timur	6,03	5,94	6,10	6,54	6,31	-3,52
24	Kalimantan Utara	7,09	6,63	6,80	7,36	6,77	-8,02
25	Sulawesi Utara	7,80	7,66	7,62	7,77	7,28	-6,31
26	Sulawesi Tengah	14,01	13,48	12,92	13,00	12,33	-5,15
27	Sulawesi Selatan	9,06	8,69	8,72	8,78	8,63	-1,71
28	Sulawesi Tenggara	11,63	11,24	11,00	11,66	11,17	-4,20
29	Gorontalo	16,81	15,52	15,22	15,61	15,42	-1,22
30	Sulawesi Barat	11,25	11,02	10,87	11,29	11,75	4,07
31	Maluku	18,12	17,69	17,44	17,87	15,97	-10,63
32	Maluku Utara	6,64	6,77	6,78	6,89	6,23	-9,58
33	Papua Barat	23,01	22,17	21,37	21,84	21,33	-2,34
34	Papua	27,74	27,53	26,64	26,86	26,56	-1,12
	Indonesia	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54	-5,92

Sumber: BPS, Susenas bulan Maret

Persentase penduduk miskin di perkotaan tahun 2022 tertinggi adalah di Provinsi Bengkulu sebesar 14,88% namun persentase ini turun dibandingkan periode tahun sebelumnya. Provinsi urutan berikutnya adalah NTB sebesar 14,10%, Sumatera Selatan sebesar 11,23%, DI Yogyakarta

sebesar 10,56%, Jambi sebesar 10,51%, dan Aceh sebesar 10,31% pada Tabel 3.2.8.

Tabel 3.2.8. Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan menurut Provinsi, 2018 – 2022

No.	Provinsi	Tahun					Pertumb. 2021-2022 (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	10,44	9,68	9,84	10,46	10,31	-1,43
2	Sumatera Utara	9,15	8,56	8,73	9,15	8,76	-4,26
3	Sumatera Barat	4,86	4,76	4,97	5,30	4,95	-6,60
4	Riau	6,35	6,28	6,12	6,52	6,34	-2,76
5	Jambi	10,41	9,81	10,41	11,52	10,51	-8,77
6	Sumatera Selatan	12,18	12,19	12,16	12,36	11,23	-9,14
7	Bengkulu	15,25	14,70	14,77	15,10	14,88	-1,46
8	Lampung	9,27	8,92	9,02	9,29	8,31	-10,55
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,09	2,85	3,06	3,57	3,09	-13,45
10	Kepulauan Riau	5,45	5,33	5,42	5,72	5,68	-0,70
11	DKI Jakarta	3,57	3,47	4,53	4,72	4,69	-0,64
12	Jawa Barat	6,47	6,03	7,14	7,82	7,57	-3,20
13	Jawa Tengah	9,73	9,20	10,09	10,58	9,92	-6,24
14	DI Yogyakarta	11,03	10,89	11,53	12,23	10,56	-13,65
15	Jawa Timur	7,06	6,84	7,89	8,38	7,71	-8,00
16	Banten	4,38	4,12	5,03	5,93	5,73	-3,37
17	Bali	3,32	3,29	3,33	4,12	4,23	2,67
18	Nusa Tenggara Barat	15,94	15,74	14,90	14,92	14,10	-5,50
19	Nusa Tenggara Timur	9,94	8,84	8,64	8,60	8,84	2,79
20	Kalimantan Barat	5,03	4,60	4,69	4,68	4,44	-5,13
21	Kalimantan Tengah	4,70	4,47	4,62	4,86	5,17	6,38
22	Kalimantan Selatan	3,54	3,53	3,61	3,89	3,64	-6,43
23	Kalimantan Timur	4,14	4,31	4,45	5,01	4,80	-4,19
24	Kalimantan Utara	5,46	5,10	5,06	5,85	5,66	-3,25
25	Sulawesi Utara	5,13	5,01	5,22	5,36	5,14	-4,10
26	Sulawesi Tengah	10,15	9,32	8,76	9,15	9,03	-1,31
27	Sulawesi Selatan	4,61	4,44	4,49	4,77	5,07	6,29
28	Sulawesi Tenggara	6,56	6,81	7,14	7,66	6,95	-9,27
29	Gorontalo	5,26	4,21	3,97	4,23	3,97	-6,15
30	Sulawesi Barat	9,64	9,63	9,59	9,82	9,76	-0,61
31	Maluku	6,22	5,84	6,23	6,29	5,82	-7,47
32	Maluku Utara	3,80	4,27	4,53	5,13	5,18	0,97
33	Papua Barat	5,10	5,63	5,85	6,50	6,96	7,08
34	Papua	4,51	4,26	4,47	4,91	5,02	2,24
	Indonesia	7,02	6,69	7,38	7,89	7,50	-4,94

Sumber: BPS, Susenas bulan Maret

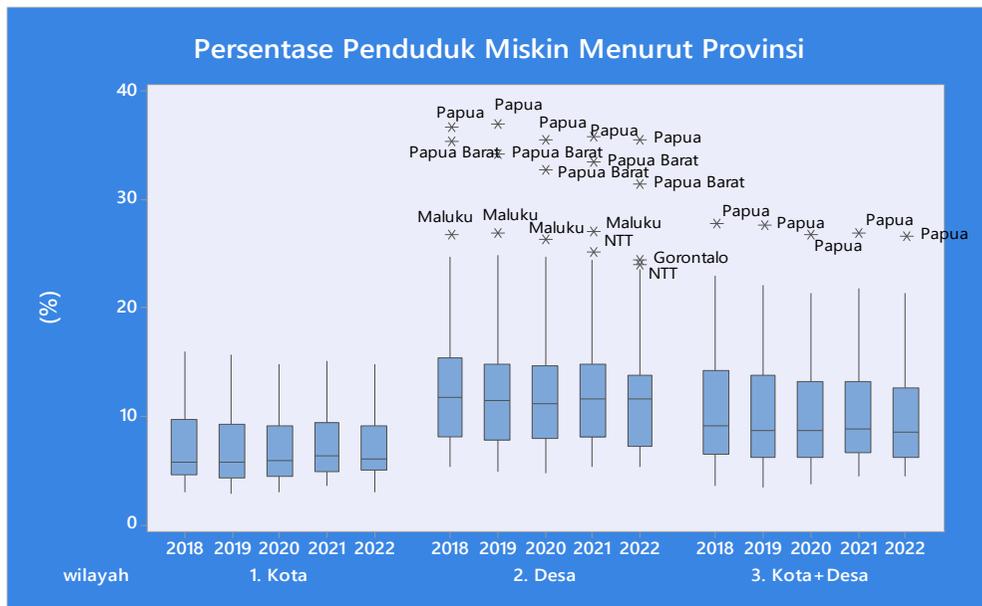
Tabel 3.2.9. Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan menurut Provinsi, 2018-2022

No.	Provinsi	Tahun					Pertumb. 2021-2022 (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	18,49	18,03	17,46	17,78	16,87	-5,12
2	Sumatera Utara	9,30	9,14	8,77	8,84	7,98	-9,73
3	Sumatera Barat	8,07	7,88	7,43	7,91	6,86	-13,27
4	Riau	8,09	7,62	7,29	7,51	7,08	-5,73
5	Jambi	6,75	6,53	6,23	6,42	6,19	-3,58
6	Sumatera Selatan	13,17	13,02	12,96	13,12	12,31	-6,17
7	Bengkulu	15,52	15,49	15,16	15,28	14,49	-5,17
8	Lampung	14,76	14,27	13,83	14,18	13,14	-7,33
9	Kepulauan Bangka Belitung	7,76	6,79	6,33	6,63	6,26	-5,58
10	Kepulauan Riau	10,77	11,04	10,43	11,10	10,68	-3,78
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	10,25	9,79	10,27	10,46	9,88	-5,54
13	Jawa Tengah	12,99	12,48	12,80	13,07	12,04	-7,88
14	DI Yogyakarta	15,12	13,89	14,31	14,44	13,65	-5,47
15	Jawa Timur	15,30	14,43	14,77	15,05	13,69	-9,04
16	Banten	7,33	7,49	8,18	8,49	7,46	-12,13
17	Bali	5,38	4,88	4,78	5,52	5,39	-2,36
18	Nusa Tenggara Barat	13,72	13,45	13,09	13,37	13,24	-0,97
19	Nusa Tenggara Timur	24,74	24,91	24,73	25,08	23,86	-4,86
20	Kalimantan Barat	9,16	9,05	8,50	8,54	8,06	-5,62
21	Kalimantan Tengah	5,47	5,33	4,96	5,38	5,36	-0,37
22	Kalimantan Selatan	5,40	5,47	5,08	5,71	5,31	-7,01
23	Kalimantan Timur	9,84	9,31	9,51	9,87	9,64	-2,33
24	Kalimantan Utara	9,36	9,02	9,46	9,82	8,75	-10,90
25	Sulawesi Utara	10,48	10,56	10,25	10,61	9,77	-7,92
26	Sulawesi Tengah	15,51	15,26	14,69	14,73	13,87	-5,84
27	Sulawesi Selatan	12,24	11,95	11,97	12,05	11,63	-3,49
28	Sulawesi Tenggara	14,77	14,09	13,50	13,89	13,57	-2,30
29	Gorontalo	24,09	23,79	23,45	24,47	24,42	-0,20
30	Sulawesi Barat	11,75	11,45	11,26	11,67	12,26	5,06
31	Maluku	26,64	26,83	26,21	26,96	23,50	-12,83
32	Maluku Utara	7,78	7,78	7,70	7,59	6,66	-12,25
33	Papua Barat	35,31	34,19	32,70	33,40	31,42	-5,93
34	Papua	36,63	36,84	35,50	35,71	35,39	-0,90
	Indonesia	13,20	12,85	12,82	13,10	12,29	-6,18

Sumber: BPS, Susenas bulan Maret

Persentase penduduk miskin perdesaan tahun 2022 sebesar 12,29% turun 6,18% dibandingkan tahun 2021 (Tabel 3.2.9). Angka kemiskinan Indonesia pada tahun 2022 secara umum menunjukkan perbaikan alias yang terendah semenjak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air. Bahkan turunnya angka kemiskinan Indonesia sudah mampu mencapai angka yang lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

Jika dirinci menurut provinsi, persentase penduduk miskin di perdesaan tahun 2022 tertinggi adalah di Provinsi Papua sebesar 35,39% namun persentase ini sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua Provinsi Papua Barat sebesar 31,42%, Ketiga Provinsi Gorontalo sebesar 24,42% dan keempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 23,86%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.9.



Gambar 3.2.7. Boxplot Persentase Penduduk Miskin Wilayah Perkotaan, Perdesaan dan Total menurut Provinsi, 2018– 2022

Gambar 3.2.7 menunjukkan hasil analisis boxplot yang menggambarkan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2018-2022. Pada wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin tidak

menunjukkan adanya data ekstrim serta relatif stagnan untuk periode 2018 – 2022. Pada wilayah perdesaan, Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku merupakan 3 provinsi pencilan dimana persentasenya lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Namun secara total perkotaan dan perdesaan, hanya Provinsi Papua saja yang merupakan provinsi dengan persentase ekstrim atas.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 1,59 naik dibandingkan September 2021 yang sebesar 1,67 untuk wilayah perkotaan dan perdesaan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) perdesaan secara umum lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,19, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,13 (Tabel 3.2.10).

Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,39 dari tahun 2021 sebesar 0,42. Nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) secara umum juga lebih tinggi daripada perkotaan. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,29, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,54 (Tabel 3.2.11).

Tabel 3.2.10. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi

(%)

No.	Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
		2021		2022	2021		2022	2021		2022
		Maret	Sept	Maret	Maret	Sept	Maret	Maret	Sept	Maret
1	Aceh	1,79	1,70	1,62	3,40	3,59	2,93	2,86	2,95	2,49
2	Sumatera Utara	1,50	1,40	1,40	1,54	1,51	1,32	1,52	1,45	1,36
3	Sumatera Barat	0,87	0,74	0,65	1,21	1,18	0,96	1,04	0,96	0,80
4	Riau	1,01	1,12	0,92	1,09	1,08	1,21	1,06	1,09	1,10
5	Jambi	2,20	1,81	1,67	0,85	0,74	0,93	1,29	1,09	1,17
6	Sumatera Selatan	2,19	2,17	2,00	2,30	2,42	1,94	2,26	2,33	1,96
7	Bengkulu	2,78	2,56	2,61	2,47	2,39	2,34	2,57	2,45	2,43
8	Lampung	1,27	1,25	1,23	2,17	2,13	2,10	1,88	1,85	1,82
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,40	0,44	0,39	0,88	0,71	0,87	0,61	0,56	0,60
10	Kepulauan Riau	1,02	0,88	1,00	1,75	1,82	1,41	1,07	0,95	1,05
11	DKI Jakarta	0,64	0,75	0,77	-	-	-	0,64	0,75	0,77
12	Jawa Barat	1,36	1,23	1,21	1,88	1,52	1,72	1,47	1,29	1,32
13	Jawa Tengah	1,68	1,75	1,56	2,15	2,15	2,00	1,91	1,94	1,77
14	DI Yogyakarta	2,35	2,05	1,93	2,61	2,11	2,25	2,42	2,06	2,01
15	Jawa Timur	1,31	1,10	1,14	2,48	2,16	2,21	1,84	1,58	1,62
16	Banten	0,98	1,14	0,96	1,37	1,36	1,22	1,09	1,20	1,03
17	Bali	0,65	0,71	0,62	0,75	0,88	0,64	0,68	0,76	0,62
18	Nusa Tenggara Barat	2,35	2,43	2,58	2,13	2,57	2,40	2,24	2,50	2,49
19	Nusa Tenggara Timur	1,39	1,40	1,51	4,81	5,93	4,35	3,96	4,79	3,63
20	Kalimantan Barat	0,59	0,62	0,54	1,28	1,24	1,33	1,03	1,02	1,04
21	Kalimantan Tengah	0,69	0,60	0,83	0,73	0,86	0,98	0,71	0,75	0,91
22	Kalimantan Selatan	0,58	0,47	0,52	0,76	0,62	0,75	0,67	0,55	0,63
23	Kalimantan Timur	1,02	0,88	0,67	1,67	1,38	1,69	1,22	1,04	0,99
24	Kalimantan Utara	0,70	0,79	0,74	1,15	1,07	1,16	0,87	0,89	0,89
25	Sulawesi Utara	0,80	0,73	0,83	1,76	1,42	1,52	1,24	1,04	1,15
26	Sulawesi Tengah	1,55	1,48	1,49	2,82	2,59	2,84	2,43	2,24	2,41
27	Sulawesi Selatan	0,79	0,63	0,76	2,06	2,03	1,87	1,49	1,40	1,36
28	Sulawesi Tenggara	1,33	1,31	1,03	2,62	3,02	2,27	2,16	2,40	1,82
29	Gorontalo	0,58	0,55	0,32	4,66	4,79	5,18	2,87	2,92	3,04
30	Sulawesi Barat	1,52	1,25	1,59	1,82	2,07	2,37	1,76	1,90	2,21
31	Maluku	0,94	0,92	0,79	5,65	5,52	4,46	3,58	3,49	2,90
32	Maluku Utara	0,97	0,96	0,55	0,97	0,93	1,06	0,97	0,94	0,91
33	Papua Barat	1,20	0,91	1,17	8,73	9,58	7,38	5,49	5,84	4,82
34	Papua	0,85	0,86	0,53	7,52	8,53	8,47	5,60	6,31	6,16
	Indonesia	1,29	1,23	1,19	2,27	2,25	2,13	1,71	1,67	1,59

Sumber: BPS

Tabel 3.2.11. Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi

(%)

No.	Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
		2021		2022	2021		2022	2021		2022
		Maret	Sept	Maret	Maret	Sept	Maret	Maret	Sept	Maret
1	Aceh	0,46	0,45	0,38	0,89	1,00	0,74	0,75	0,81	0,61
2	Sumatera Utara	0,37	0,34	0,34	0,39	0,43	0,34	0,38	0,38	0,34
3	Sumatera Barat	0,20	0,14	0,13	0,28	0,31	0,20	0,24	0,23	0,16
4	Riau	0,22	0,31	0,21	0,25	0,26	0,30	0,24	0,28	0,27
5	Jambi	0,58	0,38	0,38	0,17	0,15	0,20	0,30	0,23	0,26
6	Sumatera Selatan	0,54	0,60	0,47	0,54	0,66	0,44	0,54	0,64	0,45
7	Bengkulu	0,68	0,59	0,68	0,59	0,52	0,54	0,62	0,55	0,58
8	Lampung	0,26	0,24	0,27	0,49	0,45	0,48	0,42	0,38	0,41
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,07	0,11	0,09	0,17	0,12	0,18	0,11	0,11	0,13
10	Kepulauan Riau	0,27	0,20	0,25	0,41	0,47	0,29	0,28	0,22	0,25
11	DKI Jakarta	0,14	0,18	0,19	-	-	-	0,14	0,18	0,19
12	Jawa Barat	0,35	0,29	0,30	0,48	0,36	0,43	0,38	0,31	0,33
13	Jawa Tengah	0,39	0,42	0,37	0,51	0,50	0,47	0,45	0,46	0,42
14	DI Yogyakarta	0,65	0,56	0,48	0,66	0,45	0,58	0,65	0,53	0,51
15	Jawa Timur	0,29	0,21	0,26	0,59	0,47	0,52	0,43	0,33	0,38
16	Banten	0,24	0,32	0,25	0,32	0,39	0,32	0,26	0,34	0,27
17	Bali	0,15	0,15	0,14	0,16	0,23	0,11	0,15	0,17	0,13
18	Nusa Tenggara Barat	0,51	0,54	0,68	0,47	0,72	0,66	0,49	0,63	0,67
19	Nusa Tenggara Timur	0,32	0,38	0,34	1,29	1,79	1,13	1,05	1,44	0,93
20	Kalimantan Barat	0,12	0,12	0,09	0,30	0,31	0,33	0,23	0,24	0,24
21	Kalimantan Tengah	0,15	0,11	0,19	0,16	0,21	0,33	0,15	0,17	0,27
22	Kalimantan Selatan	0,12	0,08	0,11	0,14	0,11	0,16	0,13	0,10	0,13
23	Kalimantan Timur	0,30	0,22	0,15	0,41	0,26	0,40	0,34	0,23	0,23
24	Kalimantan Utara	0,14	0,17	0,15	0,24	0,18	0,25	0,18	0,17	0,19
25	Sulawesi Utara	0,17	0,16	0,19	0,42	0,28	0,34	0,28	0,22	0,26
26	Sulawesi Tengah	0,41	0,43	0,41	0,75	0,70	0,81	0,64	0,62	0,68
27	Sulawesi Selatan	0,18	0,14	0,18	0,53	0,50	0,43	0,37	0,34	0,32
28	Sulawesi Tenggara	0,32	0,35	0,22	0,69	0,88	0,53	0,56	0,69	0,42
29	Gorontalo	0,12	0,09	0,05	1,19	1,31	1,48	0,72	0,77	0,85
30	Sulawesi Barat	0,38	0,26	0,37	0,45	0,57	0,63	0,44	0,50	0,58
31	Maluku	0,21	0,19	0,16	1,71	1,75	1,27	1,05	1,06	0,80
32	Maluku Utara	0,25	0,28	0,11	0,19	0,17	0,24	0,21	0,20	0,20
33	Papua Barat	0,36	0,26	0,33	3,17	3,64	2,49	1,96	2,18	1,60
34	Papua	0,25	0,22	0,11	2,27	2,80	2,91	1,69	2,05	2,10
	Indonesia	0,31	0,29	0,29	0,57	0,59	0,54	0,42	0,42	0,39

Sumber: BPS

3.3. Aspek Kualitas dan Keamanan Pangan

3.3.1. Konsumsi Energi/Kalori dan Protein

Aspek kualitas dan keamanan pangan, salah satunya dicerminkan dari tingkat konsumsi energi dan protein terhadap standar ideal berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2018 adalah 2.100 kkal/kapita/hari untuk energi dan 57 gram kapita/hari untuk protein. Konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia tahun 2019 sd 2021 seperti tersaji pada Tabel 3.3.1, menunjukkan telah melebihi standar ideal yaitu konsumsi energi tahun 2021 sebesar 2.143 Kkal/kap/hari (102,06%) atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 2.112 Kkal/kap/hari (100.57%), demikian pula konsumsi protein mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2020 yaitu tahun 2021 menjadi 62,28 gram/kap/hari (109,26%).

Tabel 3.3.1. Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Indonesia, 2019-2021

Tahun	Kalori/Energi		Protein	
	Kkal/kapita/hari	% Thd Standar	Gram/kapita/hari	% Thd Standar
2019	2.121	100,98	62,13	109,00
2020	2.112	100,57	61,98	108,74
2021	2.143	102,06	62,28	109,26

Sumber : Susenas-Maret BPS

Meskipun secara nasional tingkat konsumsi energi telah melebihi standar kecukupan energi 2.100 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari, namun masih terdapat beberapa provinsi dengan tingkat konsumsi energi atau protein di bawah standar. Pada tahun 2021 terdapat 15 (lima belas) provinsi dengan rata-rata konsumsi energi di bawah standar dan 5 (lima) provinsi dengan rata-rata konsumsi protein dibawah standar (Gambar 3.3.1). Provinsi dengan rata-rata konsumsi energi per

kapita/hari terendah adalah Maluku Utara dan Maluku masing-masing 1.862,15 kkal dan 1.874,88 kkal, sedangkan konsumsi energi tertinggi di provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 2.542,98 kkal. Sementara provinsi dengan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari terendah terdapat di provinsi Papua dan Maluku Utara masing-masing 44,94 gram dan 51,59 gram, sedangkan tertinggi di provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 76,79 gram.



Gambar 3.3.1. Rata - Rata Konsumsi Energi dan Protein per Provinsi, 2021

3.3.2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Keragaman konsumsi pangan nasional yang ditunjukkan dengan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) seperti tersaji pada tabel 3.3.2, menunjukkan pola konsumsi pangan masih belum beragam dan bergizi seimbang, dilihat dari belum tercapainya skor PPH ideal 100. Dari tabel 3.3.2 menunjukkan terjadinya kenaikan skor dari 86,3 pada tahun 2020 menjadi 87,2 pada tahun 2021 atau masih kurang 12,8% dari skor ideal (Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 kkal/kapita/hari). Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan konsumsi energi dari semua kelompok pangan PPH, kecuali konsumsi kelompok pangan padi-padian yang mengalami penurunan 0,4% pada tahun 2021.

Tabel 3.3.2. Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan menurut Kelompok Pangan, 2019 - 2021

No	Kelompok Pangan	Energi (kkal/kap/hari)					Skor PPH (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi - padian	1.242	1.315	1.288	1.267	1.262	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi - umbian	67	53	50	48	59	1,6	1,2	1,2	1,2	1,4
3	Pangan Hewani	223	233	240	244	244	20,8	21,6	22,9	23,2	23,3
4	Minyak dan Lemak	255	240	242	249	270	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	36	22	21	20	21	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
6	Kacang-kacangan	62	60	59	56	57	5,8	5,6	5,6	5,3	5,4
7	Gula	103	78	76	75	77	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8
8	Sayur dan Buah	107	113	109	102	104	24,9	26,2	26,0	24,4	24,8
9	Lain-lain	33	52	52	51	50	-	-	-	-	-
Total		2.128	2.165	2.138	2.112	2.143	86,3	87,0	87,9	86,3	87,2

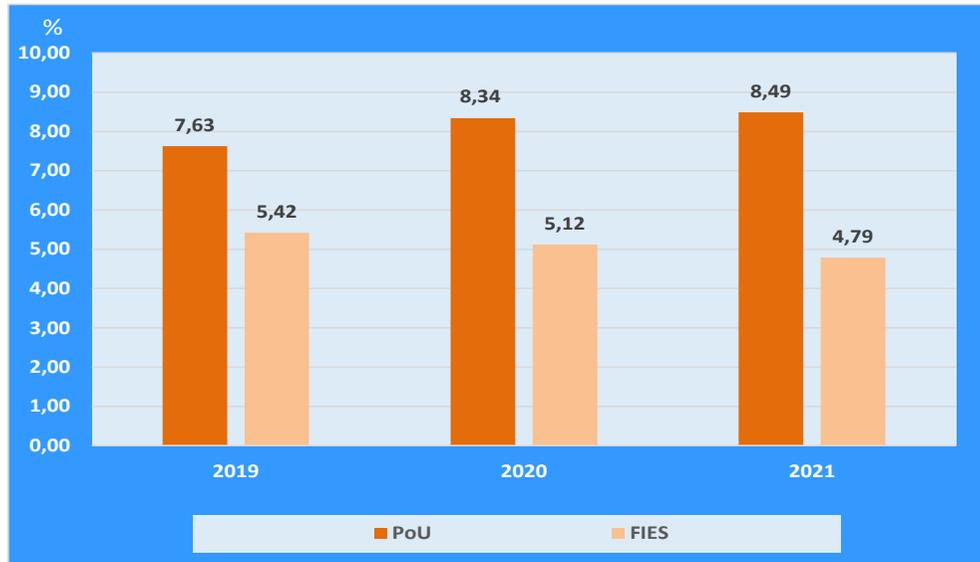
Sumber : Susenas Maret, BPS diolah Bapanas

Keterangan: Angka Kecukupan Energi 2.100 kkal/kap/hari (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, 2018)

3.3.3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan dan FIES

Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan proporsi penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Individu dikategorikan sebagai kekurangan konsumsi pangan apabila jumlah asupan energi per hari kurang dari kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktivitas yang dilakukan. Pengkategorian persentase PoU dibagi dalam 5 status yaitu sangat rendah bila PoU <2,5%, rendah nilai PoU 2,5% sd 4%, sedang nilai PoU 5%-19%, tinggi nilai PoU 20%-34% dan sangat tinggi nilai PoU > 35%.

Berdasarkan data PoU tahun 2019-2021 yang bersumber dari BPS seperti tersaji pada Gambar 3.3.2, menunjukkan bahwa angka PoU Indonesia terlihat meningkat yaitu tahun 2019 sebesar 7,63% meningkat menjadi 8,34% di tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 8,49% dengan status "sedang". Peningkatan PoU pada tahun 2020-2021 sejalan dengan peningkatan kemiskinan, dimana persentase penduduk miskin telah mengalami peningkatan sebesar 0,6 tahun 2021 menjadi 10,14% atau dari 26,42 juta jiwa tahun 2020 menjadi 27,54 juta jiwa tahun 2021, hal ini sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 mulai Maret 2020 di Indonesia hingga tahun 2021.



Gambar 3.3.2. Perkembangan Kerawanan Pangan (PoU) dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*FIES*) di Indonesia, 2019 - 2021

Capaian PoU pada tingkat nasional ini juga sejalan dengan capaian di tingkat provinsi. Angka PoU di sebagian besar provinsi di Indonesia secara konsisten mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021, provinsi dengan angka PoU satus sangat rendah adalah Povinsi NTB dan DKI Jakarta yaitu masing-masing sebesar 1,78% dan 2,2%, sementara Provinsi Banten dari status "sangat rendah" tahun 2020 menurun menjadi "rendah" tahun 2021. Sedangkan provinsi dengan angka PoU tertinggi tahun 2021 adalah Papua sebesar 37,37, sementara provinsi Maluku Utara dan Maluku terjadi penurunan angka PoU, yakni status "sangat tinggi" tahun 2020 menjadi "tinggi" tahun 2021 yakni 35,48% menjadi 28,21% (Maluku Utara) dan 35,55% menjadi 29,26% (Maluku) yang berarti makin berkurang penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi pangan, secara rinci sebaran PoU per provinsi tahun 2019-2021 disajikan pada Tabel 3.3.3.

Tabel 3.3.3. Prevelansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan per Provinsi, 2019 - 2021

No	Provinsi	2019		2020		2021	
		PoU (%)	Status	PoU (%)	Status	PoU (%)	Status
1	Aceh	9,41	sedang	8,58	sedang	6,90	sedang
2	Sumatera Utara	4,84	rendah	6,73	sedang	6,33	sedang
3	Sumatera Barat	4,90	rendah	5,86	sedang	6,02	sedang
4	Riau	8,32	sedang	9,16	sedang	10,61	sedang
5	Jambi	8,95	sedang	9,12	sedang	9,25	sedang
6	Sumatera Selatan	9,04	sedang	9,77	sedang	6,82	sedang
7	Bengkulu	7,66	sedang	7,72	sedang	8,64	sedang
8	Lampung	10,51	sedang	12,19	sedang	10,25	sedang
9	Kepulauan Bangka Belitung	7,85	sedang	9,35	sedang	11,05	sedang
10	Kepulauan Riau	4,08	rendah	6,07	sedang	7,71	sedang
11	DKI Jakarta	1,43	sangat rendah	1,94	sangat rendah	2,20	sangat rendah
12	Jawa Barat	3,70	rendah	3,90	rendah	4,44	rendah
13	Jawa Tengah	11,61	sedang	11,80	sedang	12,34	sedang
14	DI Yogyakarta	7,35	sedang	9,90	sedang	10,18	sedang
15	Jawa Timur	7,47	sedang	8,58	sedang	9,14	sedang
16	Banten	2,13	sangat rendah	2,11	sangat rendah	2,80	rendah
17	Bali	2,91	rendah	4,01	rendah	7,43	sedang
18	Nusa Tenggara Barat	2,77	rendah	2,97	rendah	1,78	sangat rendah
19	Nusa Tenggara Timur	14,11	sedang	13,12	sedang	11,84	sedang
20	Kalimantan Barat	19,11	sedang	19,92	tinggi	19,60	sedang
21	Kalimantan Tengah	9,38	sedang	10,10	sedang	8,88	sedang
22	Kalimantan Selatan	2,51	rendah	2,72	rendah	2,78	rendah
23	Kalimantan Timur	6,97	sedang	8,24	sedang	12,56	sedang
24	Kalimantan Utara	10,12	sedang	12,11	sedang	12,75	sedang
25	Sulawesi Utara	3,96	rendah	4,49	rendah	6,91	sedang
26	Sulawesi Tengah	8,44	sedang	8,85	sedang	10,63	sedang
27	Sulawesi Selatan	7,65	sedang	10,14	sedang	7,93	sedang
28	Sulawesi Tenggara	8,79	sedang	10,06	sedang	11,17	sedang
29	Gorontalo	7,78	sedang	10,33	sedang	14,84	sedang
30	Sulawesi Barat	6,79	sedang	9,16	sedang	10,81	sedang
31	Maluku	34,12	tinggi	35,55	sangat tinggi	29,62	tinggi
32	Maluku Utara	35,81	sangat tinggi	35,48	sangat tinggi	28,86	tinggi
33	Papua Barat	19,22	sedang	23,09	tinggi	24,59	tinggi
34	Papua	38,21	sangat tinggi	31,49	tinggi	37,37	sangat tinggi
	Indonesia	7,63	sedang	8,34	sedang	8,49	sedang

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Keterangan : PoU (*Prevalence of Undernourishment*) atau Prevelansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Selanjutnya kerawanan pangan sedang dan berat dapat diukur dengan FIES (*Food Insecurity Experienced Scale*) yang merupakan angka kerawanan pangan berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan. Nilai skor FIES terdiri dari (1) rawan pangan ringan atau khawatir dengan skor < 4, (2) sedang yaitu kompromi dengan kualitas dan jenis makanan atau kompromi dengan kuantitas makanan dengan skor 4-6 dan

(3) parah yaitu tidak makan atau lapar karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya dengan skor 7-8.

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS, perkembangan penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat di Indonesia tahun 2019-2021 tersaji pada Gambar 3.3.2, terlihat tren penurunan yang berarti persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan guna mencukupi kebutuhan energi sehari-hari makin menurun yaitu tahun 2019 sebesar 5,42% kemudian menurun menjadi 5,12% tahun 2020 dan menurun kembali menjadi 4,79% tahun 2021.

Provinsi dengan angka FIES tahun 2021 terendah berada di Pulau Jawa yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta masing-masing sebesar 2,87% dan 2,98%, 3,25% dan 3,57%. Sedangkan provinsi dengan angka FIES tertinggi tahun 2021 berada di Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Maluku Utara masing-masing sebesar 15,37%, 11,62% dan 10,16%, secara rinci sebaran FIES per provinsi tahun 2019-2021 disajikan pada Tabel 3.3.4

Tabel 3.3.4. Perkembangan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*FIES*) Menurut Provinsi, 2019 – 2021

No	Provinsi	FIES (%)		
		2019	2020	2021
1	Aceh	6,41	4,88	4,39
2	Sumatera Utara	6,60	6,41	6,64
3	Sumatera Barat	6,34	5,91	5,38
4	Riau	8,00	4,91	4,94
5	Jambi	5,57	4,70	4,07
6	Sumatera Selatan	6,19	6,87	5,15
7	Bengkulu	6,26	4,87	4,31
8	Lampung	7,60	7,51	5,66
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,96	3,10	3,81
10	Kepulauan Riau	6,39	4,77	7,55
11	DKI Jakarta	2,68	3,13	3,57
12	Jawa Barat	6,02	5,79	5,46
13	Jawa Tengah	3,61	2,84	2,87
14	DI Yogyakarta	2,91	2,00	3,25
15	Jawa Timur	3,49	3,24	2,98
16	Banten	6,16	6,31	4,86
17	Bali	4,09	1,84	4,51
18	Nusa Tenggara Barat	9,93	10,85	9,44
19	Nusa Tenggara Timur	10,59	15,46	15,31
20	Kalimantan Barat	6,76	7,08	6,15
21	Kalimantan Tengah	5,08	4,31	3,61
22	Kalimantan Selatan	3,27	3,70	3,99
23	Kalimantan Timur	4,61	4,84	4,29
24	Kalimantan Utara	3,45	3,37	4,54
25	Sulawesi Utara	8,48	6,29	6,71
26	Sulawesi Tengah	12,58	9,61	7,73
27	Sulawesi Selatan	4,83	4,33	4,02
28	Sulawesi Tenggara	7,55	5,58	5,53
29	Gorontalo	8,79	5,67	9,00
30	Sulawesi Barat	8,63	8,25	7,88
31	Maluku	12,03	10,95	11,62
32	Maluku Utara	14,99	12,55	10,16
33	Papua Barat	10,14	8,56	8,41
34	Papua	10,98	8,68	7,58
	Indonesia	5,42	5,12	4,79

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Keterangan : FIES (*Food Insecurity Experienced Scale*), skala pengalaman kerawanan pangan

BAB IV. ANALISIS KETAHANAN PANGAN

4.1. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Pangan

Tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi beras menyebabkan bahan pokok tersebut memiliki nilai strategis baik secara politik maupun ekonomi. Sehingga informasi perkiraan kondisi neraca ketersediaan dan kebutuhan beras melalui perhitungan prognosa sangat diperlukan sebagai acuan dalam perencanaan dan upaya penyediaan pangan nasional. Tim penyusun prognosa neraca pangan strategis yang dikoodinir oleh Ditjen sub sektor lingkup Kementerian Pertanian, BPS, dan Pusdatin, serta dilakukan updating data setiap akhir bulan sesuai rilis publikasi data penyusunnya. Berdasarkan prognosa neraca beras tahun 2022 yang dilakukan update data per Agustus 2022. Perkiraan penyediaan beras Indonesia berasal dari perkiraan produksi GKG Januari-Desember berdasarkan KSA BPS sebesar 54,57 juta ton dengan total perkiraan produksi beras 31.33 juta ton. Perkiraan total kebutuhan beras 2022 sebesar 30,77 juta ton yang terdiri dari konsumsi langsung dalam rumah tangga sebesar 22,55 juta ton dan konsumsi di luar rumah tangga sebesar 8,21 juta ton. Sehingga tahun 2022 diperkirakan terjadi surplus sebesar 555,91 ribu ton, dengan adanya stok akhir Desember 2021 sebesar 5,27 juta ton sehingga neraca beras kumulatif sd Desember 2022 menjadi 5,83 juta ton seperti tersaji tabel 4.1.1.

Tabel 4.1.1. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Beras, Januari - Desember 2022

Bulan	Prakiraan Produksi GKG (Ton)	Prakiraan Produksi Beras (Ton)	Perkiraan Kebutuhan Beras (Ton)			Prakiraan Neraca Bulanan (Produksi-Kebutuhan) (Ton)	Prakiraan Neraca Kumulatif (Surplus/ Defisit) (Ton)
			Konsumsi Luar RT	Konsumsi Langsung RT	Total		
Stok Akhir Desember 2021							5.272.537
Jan-22	2.416.360	1.391.690	1.824.082	664.277	2.488.358	-1.096.668	4.175.869
Feb-22	4.037.138	2.323.760	1.647.558	599.992	2.247.549	76.211	4.252.079
Mar-22	9.389.825	5.407.525	1.844.866	671.846	2.516.712	2.890.813	7.142.892
Apr-22	7.559.044	4.353.104	2.645.801	963.522	3.609.324	743.780	7.886.673
Mai-22	4.033.439	2.326.304	1.962.644	714.737	2.677.380	-351.076	7.535.596
Jun-22	4.360.281	2.512.107	1.765.240	642.848	2.408.089	104.018	7.639.615
Jul-22	4.722.061	2.720.541	1.841.402	670.584	2.511.986	208.554	7.848.169
Agts-22	4.724.939	2.722.199	1.824.082	664.277	2.488.358	233.841	8.082.010
Sep-22	3.839.312	2.211.959	1.765.240	642.848	2.408.089	-196.130	7.885.880
Okt-22	4.738.318	2.729.907	1.824.082	664.277	2.488.358	241.549	8.127.428
Nov-22	2.943.334	1.629.150	1.765.240	642.848	2.408.089	-778.939	7.348.490
Des-22	1.808.095	1.000.676	1.844.866	671.846	2.516.712	-1.516.036	5.832.454
Total 2022	54.572.146	31.328.921	22.555.104	8.213.900	30.769.004	559.917	

Sumber : Relisasi dan prognosa Pangan Strategis, Ditjen Tanaman Pangan update per Agustus 2022

Keterangan : 1. Stok akhir Des 2021 berdasarkan SNANK.

2. Produksi GKG Jan-Okt berdasarkan data KSA BPS posisi Ags 2022, Nov-Des berdasarkan Rata2 3 tahun bulan yang sama

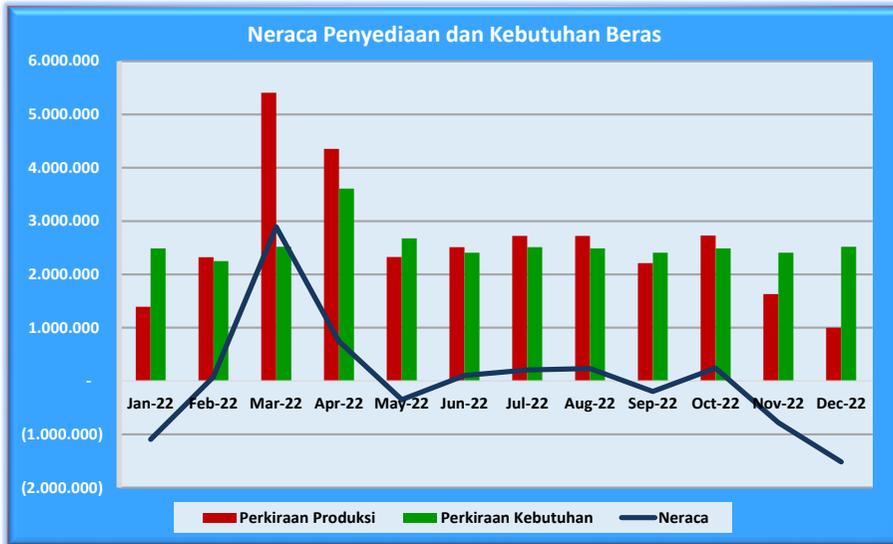
3. Kebutuhan beras 111,799 kg/kap/th terdiri dari konsumsi langsung RT (beras dan ketan) sebesar 81,83 kg/kap/th,

Susenas Tri I 2021 dan konsumsi di luar rumah tangga 29,97 kg/kap/th (Survei Bapok 2017)

4. Jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 275.773.774 jiwa (Proyeksi Penduduk Indonesia Interim (Juni) , SP 2020, BPS).

5. Koefisien kebutuhan HBKN tahun 2022 berdasarkan harian (Bapanas, 2022).

Meskipun perkiraan neraca bulanan beras tahun 2022 terlihat surplus, namun terdapat bulan yang mengalami defisit yaitu Januari, Mei, September, November s.d Desember dan bulan lainnya surplus (Gambar 4.1.1). Surplus neraca kumulatif bulanan beras tertinggi selama tahun 2022 terjadi pada bulan Maret 2022 sebesar 2,89 juta ton dan terendah terjadi pada Februari 2022 sebesar 76.2 ribu ton. Sementara defisit terbesar terjadi pada Desember dan Januari masing-masing 1,5 juta ton dan 1,10 juta ton, namun karena adanya stok akhir Desember 2021 dapat menutupi defisit tersebut.



Gambar 4.1.1. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Beras, Januari-Desember 2022

Jagung sebagai bahan baku pakan ternak, terlihat prognosa neraca jagung wujud pipilan kering tahun 2022 mengalami surplus sebesar 1,38 juta ton yang berasal dari ketersediaan sebesar 16,40 juta ton dengan kebutuhan sebesar 15,12 juta ton. Perkiraan neraca bulanan jagung pipilan selama tahun 2022 mengalami surplus pada Januari s.d Maret, November s.d Desember dan sebaliknya April s.d Oktober mengalami defisit. Surplus neraca bulanan jagung pipilan kering terbesar pada bulan Februari sebesar 1,58 juta ton dan terendah pada bulan Desember sebesar 205,9 ribu ton. Sementara defisit terbesar terjadi pada April sebesar 716,2 ribu ton, namun dengan adanya stok akhir Desember 2021 sebesar 720,97 ribu ton dapat menutupi defisit tersebut bahkan sd Desember 2022 diperkirakan surplus 2,00 juta ton, seperti tersaji pada Tabel 4.1.2.

Tabel 4.1.2. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Jagung dan Kedelai, Januari - Desember 2022

Bulan	Jagung (Ton)				Kedelai (Ton)			
	Total Ketersediaan	Total Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif	Total Ketersediaan	Total Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif
Stok Akhir Desember 2021				720.123				190.970
Jan-22	1.640.359	1.251.929	388.430	1.108.553	233.591	241.649	-8.058	182.912
Feb-22	3.239.896	1.661.003	1.578.893	2.687.446	128.994	218.206	-89.212	93.701
Mar-22	2.195.413	1.888.550	306.863	2.994.309	253.481	241.768	11.713	105.413
Apr-22	1.009.686	1.725.919	-716.234	2.278.075	309.748	233.836	75.912	181.325
Mai-22	1.317.610	1.346.636	-29.026	2.249.049	239.009	241.785	-2.776	178.550
Jun-22	1.390.430	1.731.635	-341.205	1.907.844	260.905	234.253	26.652	205.202
Jul-22	997.173	1.026.699	-29.526	1.878.317	236.148	242.316	-6.168	199.034
Agts-22	829.154	1.006.614	-177.460	1.700.857	211.383	242.112	-30.729	168.305
Sep-22	918.781	1.008.034	-89.253	1.611.604	228.481	234.043	-5.562	162.743
Okt-22	801.326	845.616	-44.291	1.567.314	271.649	241.685	29.964	192.707
Nov-22	1.055.565	826.114	229.451	1.796.765	299.349	233.771	65.578	258.285
Des-22	1.003.669	797.743	205.926	2.002.691	219.679	241.637	-21.958	236.326
Total 2022	16.399.061	15.116.493	1.282.568	2.002.691	2.892.417	2.847.061	45.356	236.326

Sumber : Relisasi dan prognosa Pangan Strategis, Ditjen Tanaman Pangan update per Agustus 2022

Total perkiraan penyediaan kedelai tahun 2022 sebesar 2,89 juta ton yang berasal dari produksi dalam negeri sebesar 298,44 ribu ton (10,32%) dan kedelai impor sebesar 2,79 juta ton (94,95%). Sementara perkiraan total kebutuhan kedelai 2022 sebesar 2,85 juta ton sehingga perkiraan neraca bulanan mengalami surplus 45,36 ribu ton. Namun adanya stok akhir Desember 2021 sebesar 191 ribu ton menyebabkan neraca kumulatif kedelai sampai dengan Desember 2022 surplus 236,3 ribu ton seperti tersaji tabel 4.1.2.

Tabel 4.1.3. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Bawang Merah dan Bawang Putih, Januari - Juli 2022

Bulan	Bawang Merah (Ton)				Bawang Putih (Ton)			
	Produksi Siap Konsumsi	Total Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif	Total Ketersediaan	Total Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif
Stok Awal 2022				103.647				146.029
Jan-22	105.714	92.912	12.801	116.448	2.206	48.127	-45.921	100.108
Feb-22	76.643	86.311	-9.669	86.983	1.694	43.076	-41.381	53.721
Mar-22	87.611	105.498	-17.887	54.309	17.315	60.543	-43.228	7.807
Apr-22	111.145	141.347	-30.202	14.874	67.436	74.957	-7.520	-103
Mai-22	82.473	105.386	-22.912	-10.567	47.283	54.604	-7.321	-7.419
Jun-22	119.553	88.169	31.384	22.613	58.553	45.264	13.289	6.241
Jul-22	120.500	96.425	24.075	42.844	56.769	54.597	2.172	8.101
Total s.d Juli 2022	703.639	716.048	-12.410	42.844	251.256	381.168	-129.910	8.101

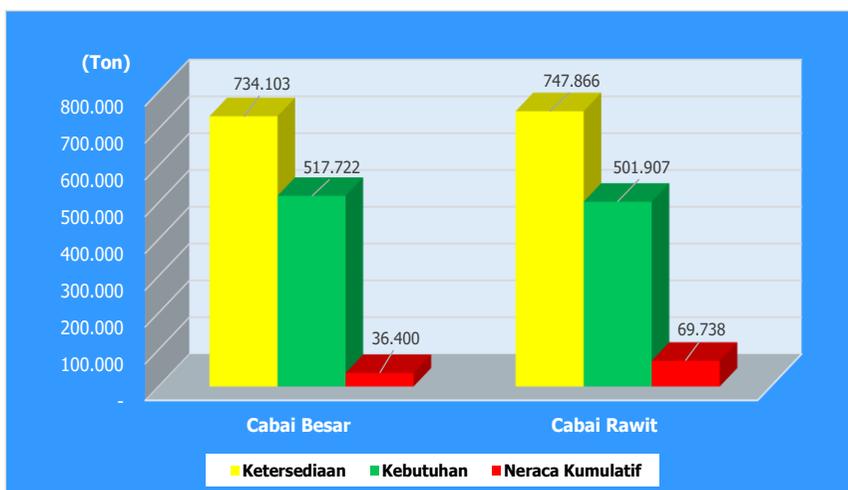
Sumber : Relisasi dan prognosa Pangan Strategis, Ditjen Hortikultura update per Agustus 2022

Tabel 4.1.3. menunjukkan bahwa prognosa neraca bawang merah dalam negeri Januari s.d Juli 2022 defisit sebesar 12,41 ribu ton. Perkiraan neraca bulanan bawang merah selama Januari s.d Juli 2022 hampir di semua bulan mengalami Defisit kecuali bulan Januari, Juni dan Juli mengalami surplus. Defisit terbesar bawang merah Februari s.d Mei 2022 yaitu di bulan April sebesar 30.202 ton dan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 9.669 ton.

Sementara prognosa neraca bawang putih, ketersediaan bulan Januari s.d Juli 2022 sebesar 97% berasal dari bawang putih impor. Tabel 4.1.3 terlihat neraca bulanan mengalami defisit 129,91 ribu ton namun jika ditambah adanya stok akhir Desember 2021 sebesar 146,03 ribu ton menjadi surplus 8,10 ribu ton. Perkiraan neraca bulanan bawang putih bulan Januari s.d Juli 2022 terlihat defisit pada bulan Januari s.d Mei dan sebaliknya terjadi surplus pada Juni dan Juli.

Neraca penyediaan dan kebutuhan komoditas lainnya seperti cabai besar dan cabai rawit selama bulan Januari sampai Juli tahun 2022 terlihat mengalami surplus artinya ketersediaan secara nasional hingga bulan Juli 2022 masih aman namun distribusi dan akses untuk sampai ke masyarakat

yang harus diperhatikan (Gambar 4.1.2). Ketersediaan cabai besar dan cabai rawit nasional berasal dari produksi siap konsumsi dalam negeri, sedangkan total kebutuhan cabai besar dan cabai rawit nasional dihitung dari kebutuhan rumah tangga (Susenas) dan di luar rumah tangga (industri, horeka, dan tercecer).



Gambar 4.1.2. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Cabe Besar dan Cabe Rawit, Januari-Juli 2022

Neraca penyediaan dan kebutuhan cabai besar dan cabai rawit bulan Januari hingga Juli tahun 2022 mengalami surplus. Dengan memperhitungkan karakteristik komoditas cabai yang mudah rusak dan stok awal tahun 2022 untuk cabai besar sebesar 52.682 ton dan cabai rawit sebesar 51.138 ton, maka masing-masing mengalami surplus kumulatif hingga Juli 2022 sebesar 36.400 ton dan 69.738 ton. Surplus neraca bulanan tertinggi untuk cabai besar dan cabai rawit terjadi pada bulan Februari 2022, masing-masing sebesar 58.037 ton dan 51.989 ton. Sementara itu surplus neraca bulanan terendah cabai besar terjadi pada Mei 2022 sebesar 18.284 ton dan untuk cabai rawit pada Juli 2022 sebesar 9.683 ton. Namun demikian neraca bulanan cabai besar mengalami defisit pada bulan Juli 2022 sebesar 13.150 ton (Tabel 4.1.4).

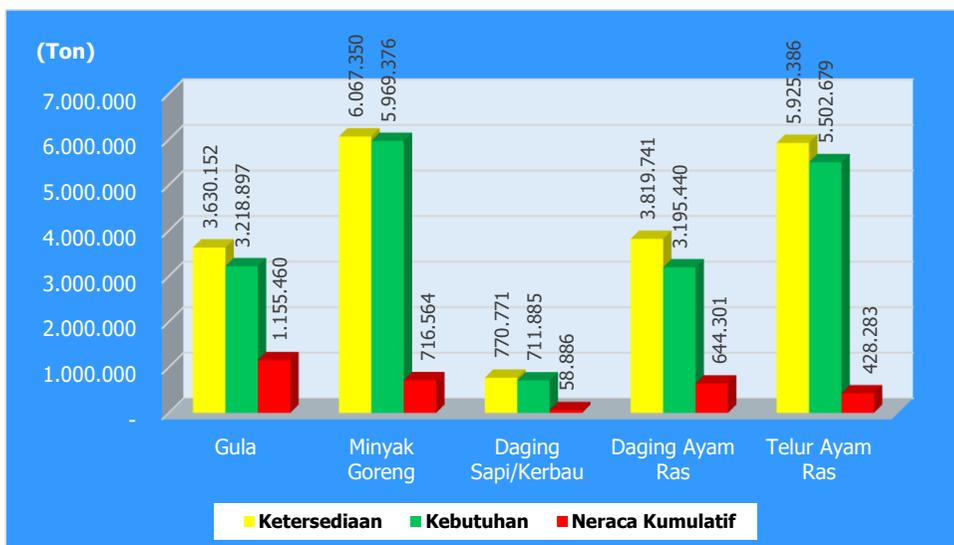
Tabel 4.1.4. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Cabe Besar dan Cabe Rawit, Januari - Juli 2022

Bulan	Cabai Besar (Ton)				Cabai Rawit (Ton)			
	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif
Stok Awal Tahun 2022				52.682				51.138
Jan-22	113.825	66.199	47.625	100.307	103.770	62.587	41.183	92.321
Feb-22	117.830	59.793	58.037	118.221	108.520	56.530	51.989	107.382
Mar-22	121.403	77.262	44.141	115.074	107.727	76.137	31.590	96.019
Apr-22	114.550	91.604	22.946	91.990	119.336	96.308	23.027	80.639
Mei-22	95.044	76.760	18.284	73.478	120.049	76.493	43.555	91.939
Jun-22	102.561	64.064	38.497	82.584	105.497	60.568	44.929	100.092
Jul-22	68.890	82.040	-13.150	36.400	82.967	73.284	9.683	69.738
Jan-Juli 2022	734.103	517.722	216.380	36.400	747.866	501.907	245.956	69.738

Sumber : Diijen Hortikultura (update per Agustus 2022)

Neraca penyediaan dan kebutuhan komoditas lainnya seperti gula, minyak goreng, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan telur ayam ras selama bulan Januari sampai Desember tahun 2022 terlihat mengalami surplus artinya ketersediaan dalam negeri untuk komoditas tersebut terpenuhi (Gambar 4.1.3).

Ketersediaan gula dihitung berdasarkan perkiraan produksi GKP (Gula Kristal Putih) dari tebu dalam negeri, impor *raw sugar* setara GKP, impor *white sugar*. Sementara itu perkiraan total kebutuhan gula dihitung berdasarkan konsumsi rumah tangga (Susenas) dan konsumsi di luar rumah tangga (horeka dan lainnya), dengan memperhitungkan adanya penambahan kebutuhan saat hari raya Idul Fitri.



Gambar 4.1.3. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Gula, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras, 2022

Tabel 4.1.5 menunjukkan perkiraan neraca gula dalam negeri selama bulan Januari sampai Desember tahun 2022 surplus sebesar 411.255 ton, dengan adanya stok akhir Desember 2021 sebesar 744.206 ton maka surplus kumulatif hingga akhir Desember 2022 menjadi 1,15 juta ton. Meskipun demikian, neraca bulanan gula menunjukkan surplus hanya pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Surplus neraca bulanan gula tertinggi terjadi pada Juni 2022 sebesar 455.611 ton dan terendah terjadi pada April 2022 sebesar 48.444 ton.

Sementara total ketersediaan minyak goreng dalam negeri bersumber dari data perkiraan produksi yang bersumber dari GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia). Perkiraan kebutuhan minyak goreng selama tahun 2022 dihitung berdasarkan kebutuhan konsumsi langsung rumah tangga (Susenas) dan konsumsi di luar rumah tangga (industri), dengan memperhitungkan adanya penambahan kebutuhan saat HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional).

Perkiraan neraca bulanan minyak goreng selama bulan Januari sampai Desember tahun 2022 secara umum surplus. Surplus neraca bulanan minyak goreng tertinggi terjadi pada April 2022 sebesar 12.359 ton dan terendah terjadi pada Februari 2022 sebesar 6.902 ton. Adanya stok minyak goreng di akhir Desember 2021 sebesar 618.590 ton menjadikan surplus kumulatif minyak goreng selama tahun 2022 sebesar 716.564 ton (Tabel 4.1.5).

Tabel 4.1.5. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Gula dan Minyak Goreng, Januari - Desember 2022

Bulan	Gula (Ton)				Minyak Goreng (Ton)			
	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif
Stok Akhir Bulan Desember 2021				744.206				618.590
Jan-22	-	249.775	-249.775	494.430	473.249	465.607	7.642	626.232
Feb-22	149.664	225.604	-75.940	418.490	427.450	420.548	6.902	633.134
Mar-22	249.653	294.363	-44.711	373.780	555.932	546.955	8.977	642.111
Apr-22	434.756	386.312	48.444	422.224	765.378	753.019	12.359	654.470
May-22	449.181	331.946	117.235	539.458	558.628	549.607	9.021	663.491
Jun-22	697.330	241.718	455.611	995.070	457.983	450.587	7.395	670.886
Jul-22	547.688	252.621	295.067	1.290.137	475.945	468.259	7.685	678.572
Aug-22	561.937	249.775	312.162	1.602.298	473.249	465.607	7.642	686.214
Sep-22	420.768	241.718	179.050	1.781.348	457.983	450.587	7.395	693.609
Oct-22	111.436	249.775	-138.339	1.643.009	473.249	465.607	7.642	701.251
Nov-22	7.740	241.718	-233.979	1.409.031	457.983	450.587	7.395	708.647
Dec-22	-	253.570	-253.570	1.155.460	490.324	482.407	7.918	716.564
Total 2022	3.630.152	3.218.897	411.255	1.155.460	6.067.350	5.969.376	97.974	716.564

Sumber : Ditjen Perkebunan (update per Agustus 2022)

Pada Tabel 4.1.6 terlihat stok awal tahun 2022 untuk daging sapi sebesar 62.485 ton merupakan stok yang berada di *cold storage* importir dan di kandang untuk sapi bakalan setara daging di *feedloter*, sedangkan stok awal tahun 2022 untuk daging ayam ras sebesar 20.000 ton merupakan stok daging ayam beku di *cold storage* pelaku usaha, dan stok awal tahun 2022 untuk telur ayam ras sebesar 5.576 ton. Produksi daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras periode Januari-Desember 2022 merupakan angka realisasi dan potensi produksi yang bersumber dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Total ketersediaan daging sapi tahun 2022 sebesar 770.771 ton sementara kebutuhan 711.885 ton, sehingga dengan memperhitungkan stok awal tahun 2022 maka surplus kumulatif daging sapi hingga Desember 2022 menjadi sebesar 58.886 ton. Perkiraan neraca bulanan daging sapi selama tahun 2022 mengalami surplus tertinggi pada Juli 2022 sebesar 15.740 ton, dan terendah terjadi pada Oktober 2022 sebesar 4.699 ton (Tabel 4.1.6).

Tabel 4.1.6. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Daging Sapi/Kerbau, Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras, Jan-Des 2022

Bulan	Daging Sapi/Kerbau (Ton)				Daging Ayam Ras (Ton)				Telur Ayam Ras (Ton)			
	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif
Stok Awal				62.485				20.000				5.576
Jan-22	44.514	53.800	-9.286	53.198	231.520	231.499	21	20.021	466.548	458.982	7.566	13.142
Feb-22	38.268	47.065	-8.797	44.401	315.366	230.634	84.732	104.753	429.826	414.564	15.262	28.404
Mar-22	56.757	59.911	-3.154	41.247	338.053	273.589	64.464	169.217	484.220	484.892	-672	27.732
Apr-22	56.002	94.730	-38.728	2.519	353.753	363.783	-10.030	159.187	489.827	503.252	-13.425	14.306
May-22	71.567	60.965	10.602	13.120	347.381	288.622	58.759	217.946	498.176	466.682	31.494	45.801
Jun-22	49.641	35.514	14.127	27.248	332.621	247.108	85.513	303.459	486.151	444.177	41.974	87.775
Jul-22	191.142	175.402	15.740	42.987	282.217	273.771	8.446	311.905	503.663	459.870	43.793	131.568
Aug-22	45.871	36.813	9.058	52.046	318.922	255.344	63.578	375.483	511.458	458.982	52.476	184.044
Sep-22	43.044	35.514	7.530	59.576	318.274	247.108	71.166	446.649	499.125	444.177	54.948	238.992
Oct-22	41.512	36.813	4.699	64.275	321.652	255.344	66.308	512.957	514.445	458.982	55.463	294.455
Nov-22	34.563	35.514	-951	63.325	336.115	247.108	89.007	601.964	503.303	444.177	59.126	353.581
Dec-22	35.406	39.845	-4.439	58.886	323.867	281.530	42.337	644.301	538.644	463.942	74.702	428.283
Total 20	770.771	711.885	58.886	58.886	3.819.741	3.195.440	624.301	644.301	5.925.386	5.502.679	422.707	428.283

Sumber : Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan (update per 16 Agustus 2022)

Neraca daging ayam ras tahun 2022 mengalami surplus sebesar 624.301 ton, dengan adanya tambahan dari stok awal tahun 2022 sebesar 20.000 ton sehingga surplus kumulatif hingga Desember 2022 menjadi 644.301 ton. Perkiraan neraca bulanan daging ayam ras tahun 2022 terlihat defisit pada April sebesar 10.030 ton, sementara bulan-bulan lainnya surplus dengan surplus tertinggi pada November 2022 sebesar 89.007 ton dan terendah pada Januari 2022 sebesar 21 ton (Tabel 4.1.6).

Neraca telur ayam ras tahun 2022 terlihat surplus sebesar 422.707 ton, dengan adanya tambahan stok awal tahun 2022 sebesar 5.576 ton sehingga surplus kumulatif sampai Desember 2022 menjadi sebesar 428.283 ton. Sementara sebaran neraca per bulannya hampir selalu surplus kecuali pada bulan Maret dan April mengalami defisit sebesar 672 ton dan 13.425 ton. Surplus neraca bulanan tertinggi untuk telur ayam ras terjadi pada bulan Desember sebesar 74.702 ton dan terendah terjadi pada Januari sebesar 7.566 ton (Tabel 4.1.6).

Bila dicermati perkiraan kebutuhan bulanan tertinggi untuk cabai besar, cabai rawit, gula, minyak goreng, daging ayam ras, dan telur ayam ras di dalam negeri terjadi pada bulan April 2022, dikarenakan pada bulan tersebut terdapat hari besar keagamaan nasional yaitu hari Raya Idul Fitri. Sedangkan perkiraan kebutuhan bulanan tertinggi untuk daging sapi/kerbau selama tahun 2022 terjadi pada bulan Juli 2022, hal ini bertepatan dengan bulan perayaan hari besar keagamaan yaitu hari raya Idul Adha.

4.2. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah nilai komposit dari indikator indikator yang digunakan untuk memotret status ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP dihitung berdasarkan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas dan kemaanan pangan. IKP nasional memiliki peran yang sangat strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. Selanjutnya IKP diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

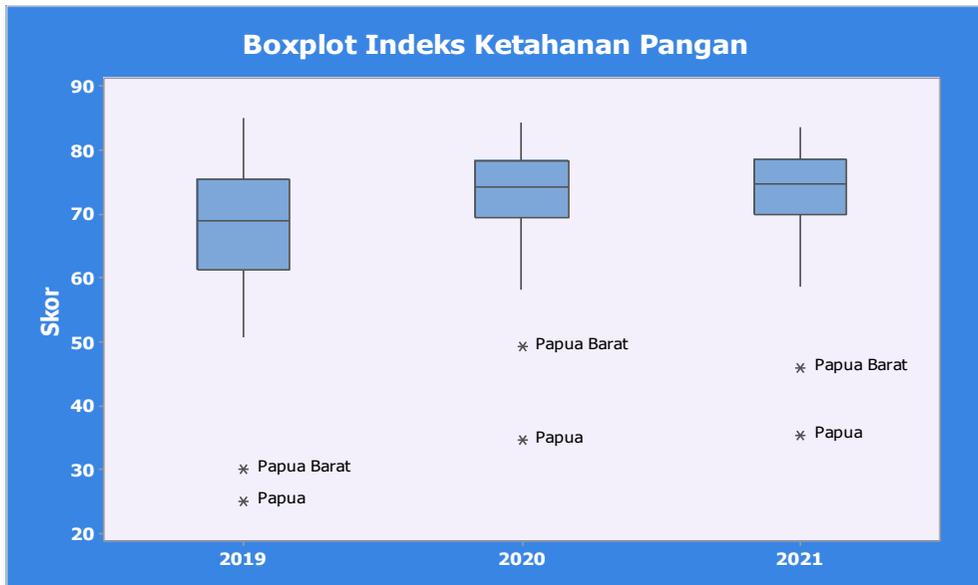
Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan tahun 2019 sd 2021 yang dihitung berdasarkan 9 indikator untuk wilayah provinsi dan kabupaten serta 8 indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan. Secara umum wilayah Indonesia bagian barat memiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Sepuluh provinsi dengan urutan skor terbaik tahun 2021 adalah Bali (83,82), Jawa Tengah (82,73), DI Yogyakarta (81,43), Sulawesi Selatan (80,82), Gorontalo (80,52), Kalimantan Selatan (80,29), Jawa Timur (79,70), Sumatera Barat (79,55), Sulawesi Utara (78,30) dan DKI Jakarta (78,01). Sedangkan sepuluh provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua (35,48), Papua Barat (46,05), Maluku (58,70), Maluku Utara (59,58), Kepulauan Riau (63,26), Nusa Tenggara Timur (67,35), Sumatera Selatan (69,55), Bengkulu (70,32) dan Kalimantan Barat (71,32), peringkat dan IKP Provinsi secara lengkap dilihat pada table 4.2.1.

Tabel 4.2.1. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, 2019 - 2021

Peringkat	2019		2020		2021	
	Provinsi	Skor	Provinsi	Skor	Provinsi	Skor
1	Bali	85,15	Bali	84,54	Bali	83,82
2	DI Yogyakarta	83,63	Jawa Tengah	82,31	Jawa Tengah	82,73
3	Sulawesi Utara	81,44	Sulawesi Selatan	81,81	DI Yogyakarta	81,43
4	Jawa Tengah	78,85	DI Yogyakarta	80,67	Sulawesi Selatan	80,82
5	Sulawesi Selatan	78,69	Gorontalo	80,40	Gorontalo	80,52
6	Sulawesi Tenggara	76,99	Kalimantan Selatan	80,04	Kalimantan Selatan	80,29
7	Kalimantan Timur	76,90	Jawa Timur	79,90	Jawa Timur	79,70
8	Jawa Barat	76,44	Sumatera Barat	78,64	Sumatera Barat	79,55
9	Sumatera Barat	75,43	Kalimantan Timur	78,24	Sulawesi Utara	78,30
10	Kalimantan Selatan	74,71	DKI Jakarta	77,97	DKI Jakarta	78,01
:						
33	Papua Barat	30,12	Papua Barat	49,40	Papua Barat	46,05
34	Papua	25,13	Papua	34,79	Papua	35,48

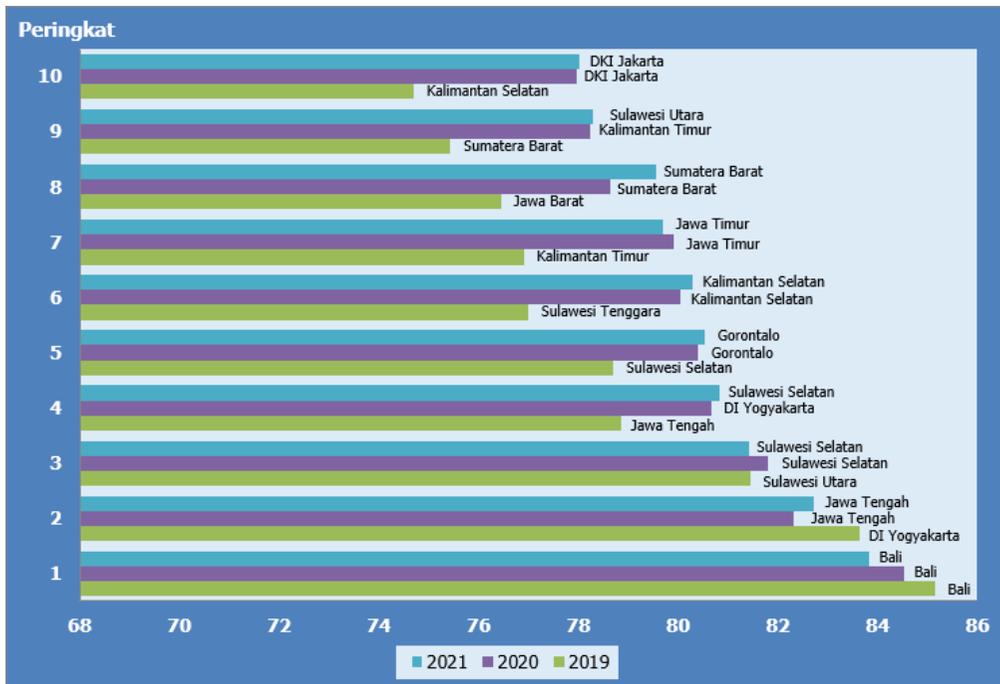
Sumber : Bapanas

Bila dicermati skor IKP provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2019-2021 makin membaik, meskipun merupakan pencilan bawah untuk wilayah provinsi Papua dan Papua Barat, dengan skor tahun 2020 Papua Barat mengalami peningkatan IKP yang lebih cepat dibanding Papua yaitu tahun 2021 menjadi 46,05 dengan kategori rawan pangan. Sementara IKP Papua sebesar 35,48 dengan kategori sangat rawan pangan. Wilayah Indonesia bagian timur secara umum memiliki nilai IKP lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia bagian barat, sehingga perlu mendapatkan prioritas penanganan kerentanan pangan yang komprehensif (Gambar 4.2.1).



Gambar 4.2.1. Boxplot Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, 2019-2021

Hasil pengelompokan provinsi berdasarkan skor indeks ketahanan pangan 2019-2021, terdapat 4 (empat) kelompok, yaitu kelompok 1 atau skor IKP tinggi terdapat di 5 (lima) provinsi, kelompok 2 atau skor IKP sedang terdapat di 22 provinsi, kelompok 3 atau skor IKP rendah terdapat di 5 (lima) provinsi dan kelompok 4 atau skor IKP sangat rendah terdapat di 2 (dua) provinsi yaitu Papua dan Papua Barat.

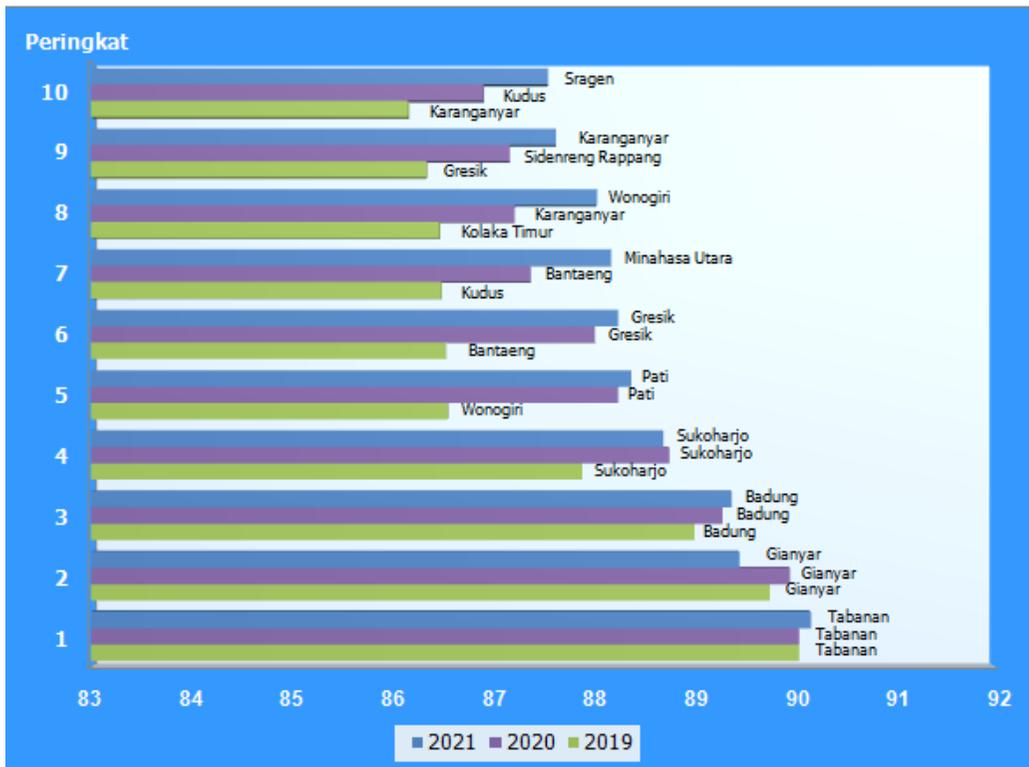


Gambar 4.2.2. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, 2019 - 2021

Sebanyak 70 kabupaten atau 16,83% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP yang rendah dengan sebaran sebagai berikut: 28 kabupaten prioritas 1; 17 kabupaten prioritas 2; dan 25 kabupaten prioritas 3. Kabupaten prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua (19 kabupaten), Papua Barat (6 kabupaten), Maluku, Riau, dan Sumatera Barat masing-masing satu kabupaten. Sedangkan pada wilayah kota ada 4 kota (4%) dari 98 kota yang memiliki skor IKP rendah, terdiri dari Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (prioritas 1); serta Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara; Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan; dan Kota Tual, Provinsi Maluku.

Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten tahun 2021, sepuluh kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Tabanan (90,17), Gianyar (89,46) dan Badung (89,38) di Provinsi Bali; Sukoharjo (88,70); Pati (88,38) di Provinsi Jawa Tengah; Gresik (88,25) di Provinsi Jawa Timur;

Minahasa Utara (88,18) di Provinsi Sulawesi Utara; Wonogiri (88,04) di Provinsi Jawa Tengah; Karanganyar (87,63) di Provinsi Jawa Tengah dan Sragen (87,55) di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan lima kabupaten dengan urutan skor terendah berada di Provinsi Papua, yaitu Nduga (14,89), Puncak (16,17), Dogiyai (17,56), Yahukimo (18,41) dan Deiyai (18,65). Peringkat dan IKP kabupaten secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.2.2.



Gambar 4.2.3. Sepuluh Peringkat Pertama dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten, 2019 - 2021

Tabel 4.2.2. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten, 2019 - 2021

Peringkat	2019		2020		2021	
	Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
1	Tabanan	90,05	Tabanan	90,05	Tabanan	90,17
2	Gianyar	89,76	Gianyar	89,96	Gianyar	89,46
3	Badung	89,01	Badung	89,29	Badung	89,38
4	Sukoharjo	87,89	Sukoharjo	88,76	Sukoharjo	88,70
5	Wonogiri	86,55	Pati	88,25	Pati	88,38
6	Bantaeng	86,53	Gresik	88,02	Gresik	88,25
7	Kudus	86,49	Bantaeng	87,38	Minahasa Utara	88,18
8	Kolaka Timur	86,47	Karanganyar	87,22	Wonogiri	88,04
9	Gresik	86,34	Sidenreng Rappang	87,17	Karanganyar	87,63
10	Karanganyar	86,16	Kudus	86,91	Sragen	87,55
:						
415	Puncak	12,26	Dogiyai	14,70	Puncak	16,17
416	Nduga	10,56	Puncak	12,63	Nduga	14,89

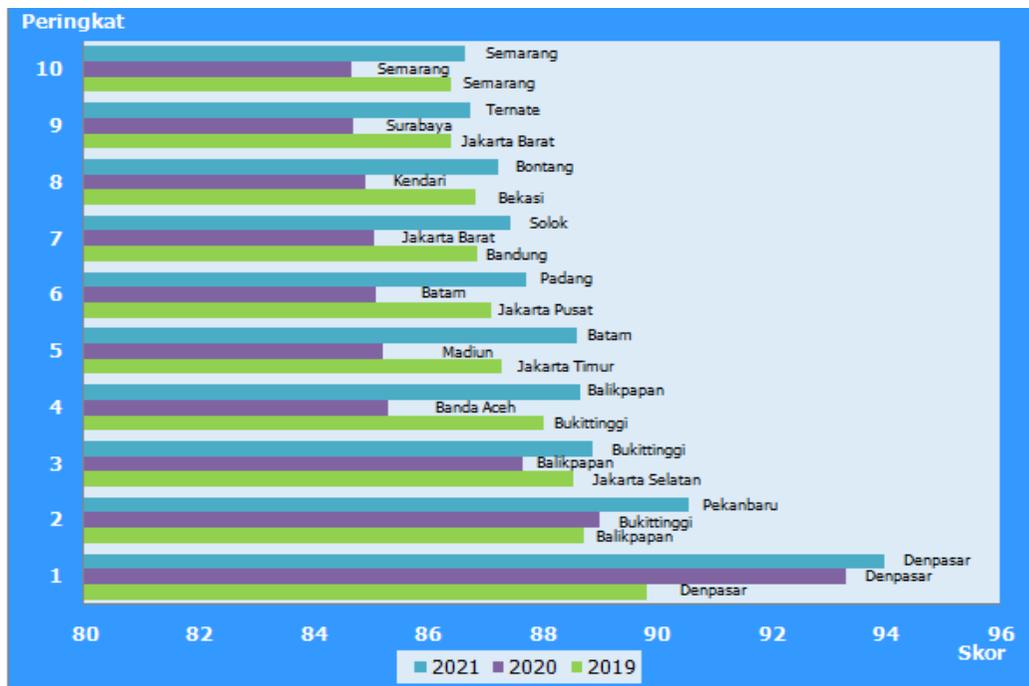
Sumber : Bapanas

Selanjutnya untuk wilayah perkotaan, sepuluh kota dengan urutan skor terbaik tahun 2021 adalah Denpasar (93,97), Pekanbaru (90,56), Bukittinggi (88,90), Balikpapan (88,68), Batam (88,60), Padang (87,73), Solok (87,45), Bontang (87,24), Ternate (86,74), dan Semarang (86,67). Sedangkan lima kota dengan urutan skor terendah yaitu Subulussalam (27,85) atau sangat rawan pangan, Tual (41,83) atau rawan pangan, Gunung Sitoli (45,67) dan Pagar Alam (47,09) dengan katagori agak rawan pangan serta Lubuk Linggau (53,91) atau agak tahan pangan. Peringkat dan IKP wilayah perkotaan dapat dilihat pada Tabel 4.2.3 dan Gambar 4.2.4.

Tabel 4.2.3. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota, 2019 -2021

Peringkat	2019		2020		2021	
	Kota	Skor	Kota	Skor	Kota	Skor
1	Denpasar	89,84	Denpasar	93,32	Denpasar	93,97
2	Balikpapan	88,74	Bukittinggi	89,01	Pekanbaru	90,56
3	Jakarta Selatan	88,56	Balikpapan	87,66	Bukittinggi	88,90
4	Bukittinggi	88,02	Banda Aceh	85,32	Balikpapan	88,68
5	Jakarta Timur	87,31	Madiun	85,23	Batam	88,60
6	Jakarta Pusat	87,10	Batam	85,09	Padang	87,73
7	Bandung	86,87	Jakarta Barat	85,06	Solok	87,45
8	Bekasi	86,85	Kendari	84,91	Bontang	87,24
9	Jakarta Barat	86,42	Surabaya	84,71	Ternate	86,74
10	Semarang	86,40	Semarang	84,66	Semarang	86,67
:						
97	Gunung Sitoli	37,46	Tual	34,80	Tual	41,83
98	Subulussalam	17,40	Subulussalam	24,53	Subulussalam	27,85

Sumber : Bapanas



Gambar 4.2.4. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota, 2019 - 2021

4.3. Global Food Security Index (GFSI)

Secara global, indeks ketahanan pangan negara-negara di dunia tersaji pada angka *Global Food Security Index* (GFSI). Indeks ketahanan pangan tersebut terdiri dari empat indikator yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan akses pangan, kualitas dan keamanan pangan, serta keberlanjutan dan adaptasi. GFSI diukur oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) *New York* yang dirilis setiap September. Indeks ini adalah model perbandingan kuantitatif dan kualitatif yang dinamis, dibangun dari 34 indikator unik pada keempat aspek, yang mengukur pendorong (*drivers*) ketahanan pangan negara berkembang dan maju. GFSI menyajikan peringkat dan skor indeks ketahanan pangan di 113 negara di dunia. Skor tersebut berkisar antara 0-100, jika skor mendekati 100 maka ketahanan pangannya semakin kuat.

Selama tahun 2018-2022, peringkat terbaik indeks ketahanan pangan Indonesia berdasarkan GFSI adalah pada tahun 2018. Pada tahun tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-58 diantara 113 negara-negara di dunia dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 63,6. Namun pada tahun 2022, peringkat Indonesia menurun ke peringkat 63 dengan skor indeks ketahanan pangan yang juga menurun menjadi 60,2. Penurunan peringkat ditahun 2022 tersebut diakibatkan oleh penurunan di tiga indikator indeks ketahanan pangan, utamanya disebabkan penurunan skor kualitas dan keamanan pangan. Peringkat kualitas dan keamanan pangan menurun tujuh poin ke urutan 78 dengan skor 56,2. Indikator selanjutnya yang juga menurun cukup besar adalah ketersediaan pangan, skor tahun 2022 sebesar 50,9 turun dibandingkan tahun 2021 sebesar 57,0 atau secara peringkat turun dari peringkat 61 ke 84. Penurunan tersebut salah satunya diakibatkan terjadinya perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga pangan dan adanya hambatan politik (*political barriers*) yang kemudian berpengaruh terhadap ketersediaan

bahan pangan. Untuk meningkatkan skor ketersediaan pangan ditahun-tahun berikutnya, salah satu tindakan yang dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi bahan pangan, baik pangan lokal maupun pangan impor. Misalnya dengan mengubah ketergantungan Indonesia terhadap impor gandum dari Ukraina menjadi penggunaan komoditas pengganti lainnya yang tersedia di Indonesia.

Indikator keterjangkauan pangan pada tahun 2022 mengalami kenaikan peringkat hingga tujuh poin menjadi peringkat 44 dengan skor 81,4 sedangkan tahun 2021 berada di peringkat 51 atau skor sebesar 78,1. Salah satu hal yang dapat tergambar dari kenaikan skor keterjangkauan pangan adalah adanya perbaikan terhadap akses pangan yang sejalan dengan perbaikan kondisi masyarakat pasca pandemi covid-19. Selanjutnya adalah indikator keberlanjutan dan adaptasi yang berada pada peringkat ke-83 pada tahun 2022. Walaupun secara peringkat indeks ini mengalami penurunan satu poin dibandingkan tahun 2021 namun skornya meningkat menjadi 46,3 sedangkan tahun 2021 sebesar 45,5. Salah satu upaya untuk meningkatkan skor indikator ini yaitu dengan meningkatkan komitmen pemerintah terhadap sektor pertanian baik dari segi pembiayaan, penanganan iklim serta memperbaiki dan memperbarui ekosistem pangan yang rusak. Saat ini, Kementerian Pertanian telah melakukan program penyediaan pangan rakyat dalam skala besar, penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk kawasan sentra produksi serta pembangunan sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah, distribusi dan pemasaran berbasis digital. Program tersebut dikenal dengan *food estate* yang dikembangkan di beberapa wilayah di Indonesia. Secara rinci peringkat dan skor indeks ketahanan pangan Indonesia berdasarkan *Global Food Security Index* tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.3.1 dan Gambar 4.3.1

Tabel 4.3.1. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan *Global Food Security Index, 2018 – 2022*

Tahun	Ketersediaan		Keterjangkauan		Kualitas dan Keamanan		Keberlanjutan dan Adaptasi		Total	
	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor
2018	55	56,5	52	80,8	71	62,8	59	49,5	58	63,6
2019	60	56,9	57	78,2	70	60,5	79	45,2	63	61,5
2020	62	57,2	43	83,3	85	53,9	80	45,5	61	61,6
2021	61	57,0	51	78,1	89	52,9	82	45,5	68	59,8
2022	84	50,9	44	81,4	78	56,2	83	46,3	63	60,2

Sumber : *Global Food Security Index*

Keterangan: Download per Tanggal 1 November 2022



Gambar 4.3.1. Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan *Global Food Security Index, 2018 – 2022*

Selanjutnya bila dilihat perkembangan GFSI negara-negara di dunia, Finlandia adalah negara dengan skor indeks ketahanan pangan tertinggi atau peringkat pertama di dunia dengan skor selama tahun 2018-2022 berkisar antara 82,7 sampai 84,3. Finlandia mampu mempertahankan

peringkatnya dari tahun 2021 sebagai negara dengan indeks ketahanan pangan tertinggi di dunia. Selanjutnya peringkat kedua yaitu Irlandia dengan skor indeks ketahanan pangan tahun 2022 sebesar 81,7. Tahun ini Irlandia juga mempertahankan posisinya pada peringkat kedua di dunia. Peringkat berikutnya secara berurutan ditempati oleh Norwegia dengan skor tahun 2022 sebesar 80,5; Prancis (80,2); Belanda (80,1); Jepang (79,5); Kanada (79,1); Swedia (79,1); Inggris (78,8); dan Portugal yang naik 7 peringkat dibandingkan dengan skor sebesar 78,7. Terlihat bahwa sebagian besar negara yang berada pada 10 besar dengan nilai indeks ketahanan tertinggi adalah negara-negara yang ada di Eropa. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak negara di Eropa masuk peringkat 10 besar adalah besarnya tingkat pendapatan nasionalnya. Jepang adalah satu-satunya negara di Benua Asia yang termasuk pada peringkat 10 besar sedangkan dari Benua Amerika diwakili oleh Kanada dan Amerika Serikat.

Tahun 2022, Indonesia berada pada peringkat 63 dunia dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 60,2 dan naik 5 peringkat dibandingkan tahun 2021. Selama lima tahun terakhir, skor indeks ketahanan pangan Indonesia tertinggi diperoleh pada tahun 2018 yaitu sebesar 63,6. Secara rinci peringkat dan skor indeks ketahanan pangan negara di dunia dapat dilihat pada Tabel 4.3.2 dan Gambar 4.3.2.

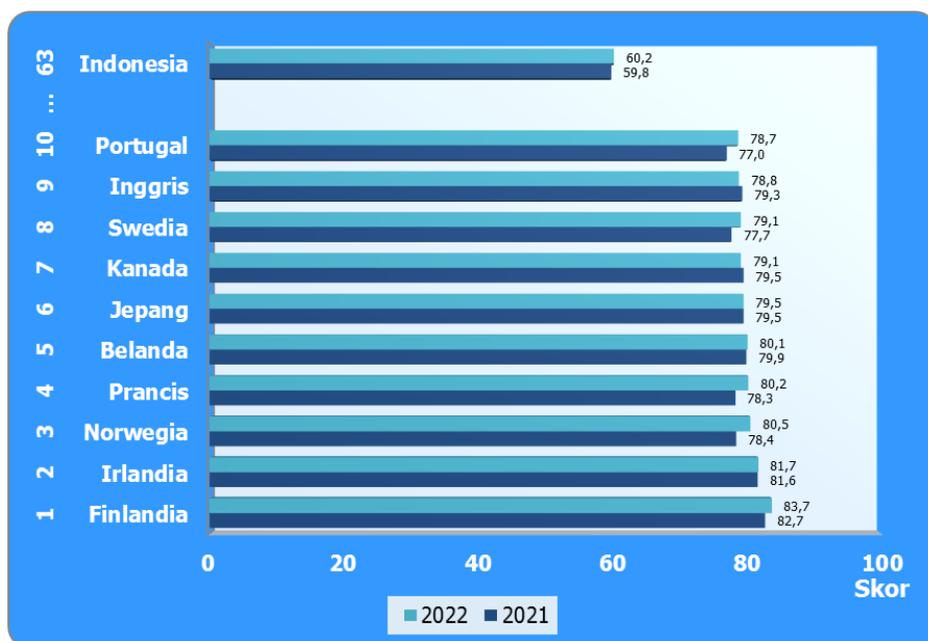
Tabel 4.3.2. Indeks Ketahanan Pangan Negara di Dunia, 2018 - 2022

Peringkat	Negara	Indeks Ketahanan Pangan Global					Pertumbuhan 2021-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Finlandia	83,8	83,6	84,3	82,7	83,7	↔
2	Irlandia	82,4	82,7	82,4	81,6	81,7	↔
3	Norwegia	82,3	81,7	80,9	78,4	80,5	▲5
4	Prancis	78,4	77,9	78,0	78,3	80,2	▲5
5	Belanda	80,7	80,9	79,5	79,9	80,1	▼2
6	Jepang	79,8	79,7	80,1	79,5	79,5	▼2
7	Kanada	76,1	77,8	77,6	79,5	79,1	▼3
8	Swedia	80,9	80,4	79,3	77,7	79,1	▲4
9	Inggris	76,9	78,4	78,8	79,3	78,8	▼3
10	Portugal	79,2	78,8	79,7	77,0	78,7	▲7
...							
63	Indonesia	63,6	61,5	61,6	59,8	60,2	▲5

Sumber : *Global Food Security Index*

Keterangan : Download per Tanggal 1 November 2022

Peringkat berdasarkan tahun 2022



Gambar 4.3.2. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Negara di Dunia, 2021 -2022

Sementara dilihat lebih rinci per aspek penyusun GFSI, Finlandia yang berada pada peringkat pertama memperoleh nilai tertinggi pada indikator keterjangkauan yaitu sebesar 91,9. Walaupun demikian, berdasarkan peringkat indeks keterjangkauan pangan, Finlandia berada pada peringkat ketujuh di dunia. Peringkat pertama dan kedua yang memperoleh skor tertinggi pada indeks ini adalah Australia dan Singapura, namun tidak termasuk kedalam sepuluh besar negara dengan indeks ketahanan pangan terbesar di dunia. Selanjutnya peringkat ketiga tertinggi untuk indeks keterjangkauan ditempati oleh Belanda dengan skor 92,7. Sedangkan Indonesia berada pada peringkat 44 dengan skor sebesar 81,4. Negara yang berada pada peringkat terakhir adalah Nigeria dengan skor 25,0. Indeks keterjangkauan sangat berhubungan dengan kelaparan. Negara-negara dengan program pengamanan pangan nasional yang tidak komprehensif dan tidak didanai dengan baik memiliki tingkat kelaparan yang lebih tinggi. Ditambah dengan ketergantungan yang lebih besar pada bantuan pangan. Hal lain yang dapat mempengaruhi skor keterjangkauan adalah volatilitas harga pangan yang besar dan kenaikan biaya.

Tabel 4.3.3. *Global Food Security Index* Negara di Dunia, 2022

Peringkat	Negara	Indeks				Skor Keseluruhan
		Keterjangkauan	Ketersediaan	Kualitas dan Keamanan	Keberlanjutan dan Adaptasi	
1	Finlandia	91,9	70,5	88,4	82,6	83,7
2	Irlandia	92,6	70,5	86,1	75,1	81,7
3	Norwegia	87,2	60,4	86,8	87,4	80,5
4	Prancis	91,3	69,0	87,7	70,3	80,2
5	Belanda	92,7	70,7	84,7	69,2	80,1
6	Jepang	89,8	81,2	77,4	66,1	79,5
7	Kanada	88,3	75,7	89,5	60,1	79,1
8	Swedia	91,9	68,3	85,0	68,3	79,1
9	Inggris	91,5	71,6	77,6	71,1	78,8
10	Portugal	90,0	77,0	79,8	64,5	78,7
⋮						
63	Indonesia	81,4	50,9	56,2	46,3	60,2
⋮						
112	Haiti	32,8	49,6	37,9	34,2	38,5
113	Suriah	32,0	26,6	50,8	38,4	36,3

Sumber: Website *Global Food Security Index*

Keterangan: Download per Tanggal 1 November 2022

Indeks selanjutnya adalah kualitas dan keamanan pangan, indeks ini sangat terkait dengan kelaparan (menggunakan kekurangan gizi sebagai ukuran) dan *stunting* pada anak-anak. Populasi dengan pola makan yang kurang berkualitas protein dan mikronutrientnya dan akses air bersih yang terbatas memperoleh skor yang rendah. Negara yang memiliki skor indeks kualitas dan keamanan pangan terbesar adalah Kanada dengan skor 89,5 kemudian disusul Denmark di peringkat kedua yang memperoleh skor sebesar 89,1. Peringkat selanjutnya ditempati Amerika Serikat (88,8), Belgia (88,4), Finlandia (88,4) dan Prancis (87,7). Indonesia berada di peringkat 78 dengan skor 56,2. Negara yang memiliki skor indeks kualitas dan keamanan pangan sebesar 34,9 dan berada pada peringkat terakhir adalah Madagaskar.

Negara yang menempati peringkat teratas dengan skor indeks ketersediaan tertinggi adalah Jepang dengan skor sebesar 81,2. Selanjutnya adalah Cina dengan skor sebesar 78,4 kemudian Singapura (77,8). Walaupun skor keseluruhan Cina dan Singapura tidak termasuk dalam peringkat sepuluh teratas namun skor indeks ketersediaannya berada di peringkat atas. Negara-negara yang mampu menyediakan komoditas pangan untuk dikonsumsi penduduknya dengan baik memperoleh skor lebih tinggi. Negara yang berada pada peringkat selanjutnya adalah Portugal (77,0); Swiss (76,8); Kanada (75,7); dan Amerika Serikat yang memperoleh skor 73,8. Indeks ketersediaan Finlandia berada pada peringkat 15 dengan skor sebesar 70,5. Peringkat indeks ketersediaan Indonesia menurun 27 peringkat dibandingkan tahun 2021 menjadi pada peringkat 84 dengan skor 50,9. Peringkat terakhir adalah Suriah dengan skor sebesar 26,6.

Indikator terakhir adalah keberlanjutan dan adaptasi. Skor tertinggi sebesar 87,4 diperoleh oleh Norwegia. Peringkat kedua adalah Finlandia dengan skor 82,6 kemudian disusul Irlandia dan New Zealand dengan skor

sama yaitu 75,1. Peringkat lima dan enam adalah Republik Ceko (73,3) dan Inggris (71,1). Indonesia memperoleh skor sebesar 46,3 dan berada di peringkat 83 turun satu peringkat dibandingkan tahun 2021. Peringkat terbawah atau ke-113 yang memiliki skor indeks keberlanjutan dan adaptasi terkecil adalah Paraguay sebesar 32,8. Faktor yang sangat mempengaruhi indeks ini untuk saat ini adalah perubahan iklim dan kerusakan alam.

Sementara bila dilihat pada kawasan Asia Pasifik yang mencakup 23 negara, peringkat teratas adalah Jepang dengan skor sebesar 79,5 ditahun 2022. Sebagai negara dengan skor indeks ketahanan pangan terbesar di Asia Pasifik, Jepang juga termasuk kedalam sepuluh negara teratas di dunia yaitu menempati urutan ke-6. Dari tahun 2018 sampai dengan 2022, Jepang mempertahankan peringkatnya pada urutan pertama negara dengan ketahanan pangan yang kuat di Asia Pasifik. Peringkat kedua ditempati oleh New Zealand dengan skor tahun 2022 sebesar 77,8. Negera-negara selanjutnya yang berada pada peringkat 10 besar adalah Australia dengan skor tahun 2022 sebesar 75,4; Cina (74,2); Singapura (73,1), Kazakhstan (72,1); Korea Selatan (70,2); Malaysia (69,9); Vietnam (67,9); dan Indonesia (60,2).

Terdapat empat negara di Asia Tenggara yang berada pada peringkat 10 besar negara dengan skor indeks ketahanan pangan terbesar di Asia Pasifik yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam dan termasuk Indonesia. Indonesia berada pada peringkat ke-10 ditahun 2022 dengan skor indeks ketahanan pangan meningkat dari 59,8 menjadi 60,2. Walaupun Indonesia masuk pada peringkat sepuluh besar, namun angka ketahanan pangannya masih dikatakan belum terlalu tahan sehingga perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk penguatan ketahanan pangan di Indonesia. Selanjutnya negara di Asia Pasifik yang menempati urutan terakhir berdasarkan angka

indeks ketahanan pangan tahun 2022 adalah Pakistan dengan skor 52,2 (Tabel 4.3.4).

Tabel 4.3.4. Indeks Ketahanan Pangan Negara di Asia Pasifik, 2018 – 2022

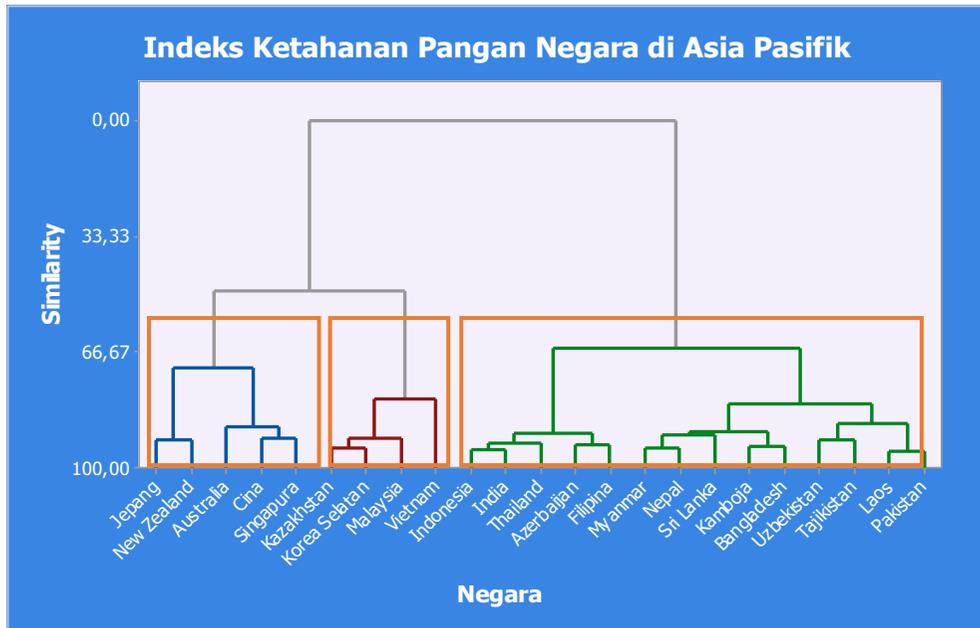
Peringkat	Negara	Indeks Ketahanan Pangan Global				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jepang	79,8	79,7	80,1	79,5	79,5
2	New Zealand	77,0	77,6	77,9	77,4	77,8
3	Australia	77,1	75,7	73,8	70,7	75,4
4	Cina	71,6	73,4	70,3	70,6	74,2
5	Singapura	72,4	74,7	74,7	72,8	73,1
6	Kazakhstan	68,2	71,2	71,6	70,7	72,1
7	Korea Selatan	68,4	69,2	70,1	68,9	70,2
8	Malaysia	67,2	68,6	67,9	71,5	69,9
9	Vietnam	67,3	65,6	65,5	62,7	67,9
10	Indonesia	63,6	61,5	61,6	59,8	60,2
:						
23	Pakistan	53,4	54,1	51,4	50,0	52,2

Sumber : *Global Food Security Index*

Keterangan : Download per Tanggal 1 November 2022

Peringkat berdasarkan tahun 2022

Jika indeks ketahanan pangan negara-negara di Asia Pasifik dikelompokkan berdasarkan kemiripannya, maka diperoleh bahwa kelompok 1 terdiri dari lima negara, kelompok 2 terdiri dari empat negara dan kelompok 3 empat belas negara. Negara yang termasuk pada kelompok 1 atau negara dengan skor indeks ketahanan pangan besar antara lain Jepang, New Zealand, Australia, Cina dan Singapura. Kelompok 2 terdiri dari Kazakhstan, Korea Selatan, Malaysia, dan Vietnam. Kemudian kelompok 3 yaitu negara dengan skor ketahanan pangan kecil terdiri dari Indonesia, India, Thailand, Azerbaijan, Filipina, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Bangladesh, Uzbekistan, Tajikistan, Laos dan Pakistan (Gambar 4.3.3).



Gambar 4.3.3. Pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan Global Negara di Asia Pasifik, 2018 – 2022

Secara keseluruhan, negara di Asia Pasifik yang memiliki skor tertinggi adalah Jepang (79,5). Jika dilihat dari indeks keterjangkauan, peringkat Jepang masih di bawah Australia, Singapura dan New Zealand. Skor keterjangkauan Jepang sebesar 89,8 sedangkan Australia (93,3); Singapura (93,2) dan New Zealand (91,6). Peringkat selanjutnya dibawah Jepang adalah Malaysia (87,0), Cina (86,4), Vietnam (84,0), dan Thailand (83,7). Berikutnya adalah Indonesia yang berada di peringkat sembilan dengan skor 81,4. Skor indeks keterjangkauan Indonesia berada pada peringkat keempat terbesar di Asia Tenggara setelah Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Pada indeks ketersediaan, peringkat pertama ditempati Jepang dengan skor 81,2. Selanjutnya Cina (79,2), Singapura (77,8), Korea Selatan (71,5), dan Nepal (70,9). Indonesia berada pada urutan terakhir atau 23 dengan skor sebesar 50,9 (Tabel 4.3.5).

Tabel 4.3.5. *Global Food Security Index* Negara di Asia Pasifik, 2022

Peringkat	Negara	Indeks				Skor Keseluruhan
		Keterjangkauan	Ketersediaan	Kualitas dan Keamanan	Keberlanjutan dan Adaptasi	
1	Jepang	89,8	81,2	77,4	66,1	79,5
2	New Zealand	91,6	67,7	73,1	75,1	77,8
3	Australia	93,3	61,1	84,0	58,8	75,4
4	Cina	86,4	79,2	72,0	54,5	74,2
5	Singapura	93,2	77,8	69,7	44,3	73,1
6	Kazakhstan	78,0	67,2	76,3	65,4	72,1
7	Korea Selatan	76,8	71,5	71,5	58,5	70,2
8	Malaysia	87,0	59,5	74,7	53,7	69,9
9	Vietnam	84,0	60,7	70,2	52,2	67,9
10	Indonesia	81,4	50,9	56,2	46,3	60,2
:						
23	Pakistan	59,9	58,3	49,4	37,7	52,2

Sumber: Website Global Food Security Index

Ket : Download per Tanggal 1 November 2022

Peringkat pertama untuk indeks kualitas dan keamanan pangan ditempati oleh Australia dengan skor 84,0. Peringkat selanjutnya adalah Jepang (77,4), Kazakhstan (76,3), Malaysia (74,7), New Zealand (73,1) dan Cina (72,0). Sedangkan Indonesia berada di peringkat 17 yang memperoleh skor sebesar 56,2. Peringkat terakhir ditempati Thailand dengan skor sebesar 45,3.

Untuk indeks keberlanjutan dan adaptasi, Indonesia berada pada peringkat 15 dengan skor sebesar 46,3. Indonesia masih berada di atas Nepal, Srilanka, Azerbaijan, Singapura, Bangladesh, Filipina, Pakistan dan Kamboja. Sedangkan peringkat pertama di Asia Pasifik adalah New Zealand dengan skor 75,1. Upaya yang diperlu dilakukan Indonesia agar bisa meningkatkan skor indeks ini salah satunya dengan memperbaiki ekosistem pangan dan upaya untuk memperkecil risiko perubahan iklim.

BAB V. KESIMPULAN

Dari pembahasan analisis di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek ketersediaan mencakup produksi, stok serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Berdasarkan data hasil Kerangka Survei Area (KSA) BPS tahun 2019 sampai 2021, perkembangan luas panen padi di Indonesia cenderung menurun sebesar 1,25% per tahun atau menjadi 10,41 juta hektar tahun 2021. Puncak panen padi di Indonesia terjadi pada bulan Maret untuk tahun 2019 dan 2021, namun tahun 2020 bergeser pada bulan April. Selain pada bulan tersebut, puncak panen kedua terjadi pada Agustus dan selanjutnya luas panen makin berkurang sampai awal tahun berikutnya.
2. Berdasarkan rata-rata produksi padi 2019-2021 sekitar 88% produksi padi Indonesia berada di 12 (duabelas) provinsi, kontribusi 52,11% disumbang dari 3 (tiga) Provinsi di Jawa yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing menyumbang 17,91%, 17,57% dan 16,63%. Provinsi berikutnya adalah Sulawesi Selatan dengan kontribusi 9,08%, disusul oleh provinsi Sumatera Selatan (4,83%), Lampung (4,46%), sementara provinsi sentra selanjutnya Sumatera Utara, Aceh, Banten, Sumatera Barat, NTB dan Kalimantan Selatan dengan kontribusi kurang dari 4%.
3. Stok pangan merupakan jumlah pangan yang disimpan sebagai cadangan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan BPS dengan melakukan survei pada 3 periode yaitu 31 Maret, 30 April dan Akhir Juni 2022 dengan jumlah stok beras sebesar 9,11 juta ton (31 Maret), 10,15 juta ton (30 April) dan 9,71 juta ton (akhir Juni 2022). Rata-rata stok beras pada 3 (tiga) periode tersebut sebesar 9,66 juta

ton, dengan sebaran stok di rumah tangga (produsen dan konsumen) sebesar 66,82%, disusul di pedagang 11,8%, di Bulog 10,04%, penggilingan 9,03%, horeka dan industri sebesar 2,32%. Stok di rumah tangga utamanya di rumah tangga produsen atau petani mencapai 92% sebagian besar berupa gabah/GKG. Sementara stok beras di pemerintah adalah stok beras yang berada di Bulog yang tersebar di 26 Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia. Awal tahun 2020 yakni Januari sd. Februari 2020 rata-rata stok beras berada di atas 1,5 juta ton, selanjutnya terlihat mulai Maret 2020 atau awal terjadinya masa Pandemi Covid-19 di Indonesia sampai dengan saat ini stok beras di Bulog memiliki pola stok pada 1 juta ton s.d bawah 1,5 juta ton dan saat ini posisi tersebut dianggap sebagai stok aman beras di Bulog.

4. Sejalan dengan uraian di atas, terlihat produksi beras dalam negeri kaitannya dengan kebutuhan beras untuk memenuhi konsumsi beras masyarakat yang dihitung berdasarkan nilai *Self Sufficiency Ratio (SSR)* tahun 2019-2021 mendekati 99% yang berarti sebagian besar kebutuhan beras Indonesia dapat dipenuhi oleh produksi domestik atau Indonesia telah mencapai swasembada beras, dan sebaliknya *Import Dependency Ratio (IDR)* sangat kecil berkisar 1,01% s.d 1,27%.
5. Sementara IDR dan SSR untuk komoditas pangan lainnya tahun 2019-2021, terdapat 2 (dua) komoditas pangan utama yang memiliki nilai ketergantungan impor (IDR) relatif tinggi sekitar 65% - 92% yaitu kedelai dan gula yang digunakan untuk bahan baku industri, sedangkan ketergantungan terhadap daging sapi impor sekitar 27% - 33%. Sementara pemenuhan kebutuhan komoditas seperti jagung (utama sebagai bahan pakan ternak), cabe, bawang merah, daging ayam dan telur ayam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri yang ditunjukkan dari nilai SSR mendekati 100%.

6. Selanjutnya aspek keterjangkaun, berdasarkan data Susenas BPS pengeluaran untuk bahan makanan di wilayah perkotaan dan perdesaan Indonesia tahun 2021 sekitar 49,25% dari total pengeluaran per kapita dalam sebulan Rp 622.845,- Pengeluaran ini meningkat 3,25% dari tahun 2020.
7. Pengeluaran untuk makanan di wilayah perkotaan cenderung merata untuk semua bahan makanan, sementara di perdesaan pengeluaran untuk makanan cenderung mengelompok menjadi 3 yaitu kelompok atas untuk padi-padian dan rokok, kelompok tengah untuk ikan dan sayuran, dan kelompok bawah untuk daging, telur susu dan buah-buahan.
8. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan persentase pengeluaran untuk makanan relatif rendah sekitar 41% dari total pengeluaran, sebaliknya Papua, Aceh dan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan persentase pengeluaran untuk makanan paling tinggi sekitar 57%. Namun dari sisi nilai pengeluaran untuk makanan, DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi pengeluaran per kapita sebulan tahun 2021 Rp. 923.933,- atau turun 2,20% dibandingkan tahun 2020 dan terendah di provinsi Sulawesi Barat Rp. 453.031,- atau turun 0,88% dibandingkan tahun 2020.
9. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2022 turun 5,02% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 26,16 juta orang. Penurunan kemiskinan ini tidak lepas dari pemulihan ekonomi yang berlangsung sejak tahun 2021. Namun bila dibandingkan tahun 2018, jumlah penduduk miskin cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun, tahun 2018 jumlahnya mencapai 25,95 juta orang, tahun 2019 menjadi 25,14 juta orang, pada tahun 2020 menjadi 26,42 juta orang dan tahun 2021 meningkat menjadi 27,54 juta orang. Persentase penduduk miskin perkotaan tahun 2022 turun menjadi 7,50% dari tahun 2021.

Sementara persentase penduduk miskin perdesaan turun menjadi 12,29 persen.

10. Aspek kualitas dan keamanan pangan, salah satunya dicerminkan dari tingkat konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia tahun 2019 s.d 2021 telah melebihi standar ideal, konsumsi energi tahun 2021 sebesar 2.143 Kkal/kap/hari (102,06%) dan konsumsi protein 62,28 gram/kap/hari (109,26%). Namun masih terdapat beberapa provinsi dengan tingkat konsumsi energi atau protein di bawah standar, tahun 2021 terdapat 15 (lima belas) provinsi dengan rata-rata konsumsi energi di bawah standar dan 5 (lima) provinsi dengan rata-rata konsumsi protein dibawah standar.
11. Pola konsumsi pangan masih belum beragam dan bergizi seimbang, dilihat dari belum tercapainya skor PPH ideal 100. Skor PPH tahun 2020 sebesar 86,3 meningkat menjadi 87,2 pada tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi energi dari semua kelompok pangan PPH, kecuali konsumsi kelompok pangan padi-padian yang mengalami penurunan 0,4% pada tahun 2021.
12. Berdasarkan data *Prevalence of Undernourishment (PoU)* tahun 2019-2021 yang bersumber dari BPS, menunjukkan proporsi penduduk yang kekurangan konsumsi pangan di Indonesai berfluktuatif yaitu tahun 2019 sebesar 7,63 % meningkat menjadi 8,34% di tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 8,49% dengan status "sedang". Peningkatan PoU pada tahun 2020 dan 2021 sejalan dengan peningkatan kemiskinan, sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19.
13. Sementara berdasarkan perkembangan kerawanan pangan sedang atau berat (*FIES-Food Insecurity Experienced Scale*) di Indonesia tahun 2019-2021, menunjukan tren penurunan yang berarti persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan guna

mencukupi kebutuhan energi sehari-hari makin menurun, yaitu tahun 2019 sebesar 5,42% kemudian menurun menjadi 5,12% tahun 2020 dan menurun kembali menjadi 4,79% tahun 2021.

14. Berdasarkan prognosa neraca beras tahun 2022 *update* data per Agustus 2022. Perkiraan penyediaan beras Indonesia berasal dari perkiraan produksi GKG Januari - Desember KSA BPS sebesar 54,57 juta ton dengan total perkiraan produksi beras 31,33 juta ton. Sementara perkiraan total kebutuhan beras 2022 sebesar 30,77 juta ton yang terdiri dari konsumsi langsung dalam rumah tangga sebesar 22,55 juta ton dan konsumsi di luar rumah tangga sebesar 8,21 juta ton. Sehingga tahun 2022 diperkirakan terjadi surplus sebesar 555,91 ribu ton, dengan adanya stok akhir Desember 2021 sebesar 5,27 juta ton maka neraca beras kumulatif sd Desember 2022 menjadi 5,83 juta ton.
15. Neraca penyediaan dan kebutuhan komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, gula, minyak goreng, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan telur ayam ras selama tahun 2022 terlihat mengalami surplus artinya ketersediaan secara nasional aman namun distribusi dan akses untuk sampai ke masyarakat yang harus diperhatikan.
16. Secara umum wilayah Indonesia bagian barat memiliki Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Sepuluh provinsi dengan urutan skor terbaik tahun 2021 adalah Bali (83,82), Jawa Tengah (82,73), DI Yogyakarta (81,43), Sulawesi Selatan (80,82), Gorontalo (80,52), Kalimantan Selatan (80,29), Jawa Timur (79,70), Sumatera Barat (79,55), Sulawesi Utara (78,30) dan DKI Jakarta (78,01). Sedangkan sepuluh provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua (35,48), Papua Barat (46,05), Maluku (58,70), Maluku Utara (59,58), Kepulauan Riau

- (63,26), Nusa Tenggara Timur (67,35), Sumatera Selatan (69,55), Bengkulu (70,32) dan Kalimantan Barat (71,32).
17. Sepuluh kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Tabanan (90,17), Gianyar (89,46) dan Badung (89,38) di Provinsi Bali; Sukoharjo (88,70); Pati (88,38) di Provinsi Jawa Tengah; Gresik (88,25) di Provinsi Jawa Timur; Minahasa Utara (88,18) di Provinsi Sulawesi Utara; Wonogiri (88,04) di Provinsi Jawa Tengah; Karanganyar (87,63) di Provinsi Jawa Tengah dan Sragen (87,55) di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan lima kabupaten dengan urutan skor terendah berada di Provinsi Papua, yaitu Nduga (14,89), Puncak (16,17), Dogiyai (17,56), Yahukimo (18,41) dan Deiyai (18,65). Sedangkan 28 kabupaten dari 416 kabupaten merupakan kabupaten dengan katagori sangat rentan pangan atau merupakkn prioritas pertama, dengan skor terendah berada di Kabupaten Nduga (14,89) dan Puncak (16,17).
18. Sepuluh kota dengan urutan skor terbaik tahun 2021 adalah Denpasar (93,97), Pekanbaru (90,56), Bukittinggi (88,90), Balikpapan (88,68), Batam (88,60), Padang (87,73), Solok (87,45), Bontang (87,24), Ternate (86,74), dan Semarang (86,67). Sedangkan lima kota dengan urutan skor terendah yaitu Subulussalam (27,85) atau sangat rawan pangan, Tual (41,83) atau rawan pangan, Gunung Sitoli (45,67) dan Pagar Alam (47,09) dengan katagori agak rawan pangan serta Lubuk Linggau (53,91) atau agak tahan pangan.
19. Selama tahun 2018 - 2022, peringkat terbaik indeks ketahanan pangan Indonesia berdasarkan *GFSI (Global Food Security Index)* adalah pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-58 diantara 113 negara – negara di dunia dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 63,6. Namun pada tahun 2022, turun 5 peringkat menjadi 63 dengan skor 60,2.

20. Penurunan peringkat ditahun 2022 tersebut diakibatkan oleh penurunan di tiga indikator indeks ketahanan pangan, utamanya disebabkan penurunan skor kualitas dan keamanan pangan. Peringkat kualitas dan keamanan pangan menurun tujuh poin ke urutan 78 dengan skor 56,2. Indikator selanjutnya yang juga menurun cukup besar adalah ketersediaan pangan, skor tahun 2022 sebesar 50,9 turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 57,0 atau secara peringkat turun dari peringkat 61 ke 84.
21. Indeks ketahanan pangan negara – negara di Asia Pasifik bila dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan kemiripannya, yaitu kelompok 1 atau IKP tinggi terdiri dari lima negara antara lain Jepang, Selandia Baru, Australia, Cina dan Singapura, kelompok 2 atau IKP terdiri dari empat negara serta kelompok 3 atau IKP dengan skor katahanan pangan kecil terdiri empat belas negara yaitu Indonesia, India, Thailand, Azerbaijan, Filipina, Myanmar, Nepal, Srilanka, Kamboja, Bangladesh, Uzbekistan, Tajikistan, Laos dan Pakistan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.

BPS. 2021. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. Jakarta.

BPS. 2020. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2020. Jakarta

BPS. 2015. Indeks Ketahanan Pangan. <https://www.bps.go.id/news/2015/05/06/110/indeks-ketahanan-pangan.html> [terhubung berkala]

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, 2022. Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan. Jakarta

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, 2021. Panduan Prognosa Neraca Pangan Strategis Tahun 2021. Jakarta

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, 2019-2021. Indeks Ketahanan Pangan 2019 - 2021. Jakarta

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, 2019. Situasi Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia Tahun 2019. Jakarta

Darmawan, Dedy. 2020. CIPS: Akses Pangan di Indonesia Sering Luput dari Perhatian. <https://republika.co.id/berita/qlj19c370/cips-akses-pangan-di-indonesia-sering-luput-dari-perhatian> [terhubung berkala]

<https://database.pertanian.go.id/eksim2012>

<https://impact.economist.com/>

<http://pusatkkp.bkp.pertanian.go.id/pou/>



**PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
Jl. Harsono RM No. 3 Gd. D Lt. IV Ragunan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7805305, Fax (021) 7805305, 7806385
Homepage : <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id>**